

**PERAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LONDON  
DALAM MERESPON PANDEMI COVID-19 BAGI PELAJAR  
INDONESIA DI INGGRIS**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANWAR MAULANA SIDIK**

18323192

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**PERAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LONDON  
DALAM MERESPON PANDEMI COVID-19 BAGI PELAJAR  
INDONESIA DI INGGRIS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**ANWAR MAULANA SIDIK**

18323192

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di London Dalam Merespon Pandemi Covid-19 Bagi Pelajar Indonesia di Inggris

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

10 Juni 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D

2 Wahyu Arif Raharjo, S.I.P., M.I.R

3 Gustrieni Putri S.IP., M.A

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hasbi", written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wahyu", written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gustrieni", written over a horizontal line.

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 24 Mei 2022*



Handwritten signature of Anwar Maulana Sidik in black ink.

---

*Anwar Maulana Sidik*



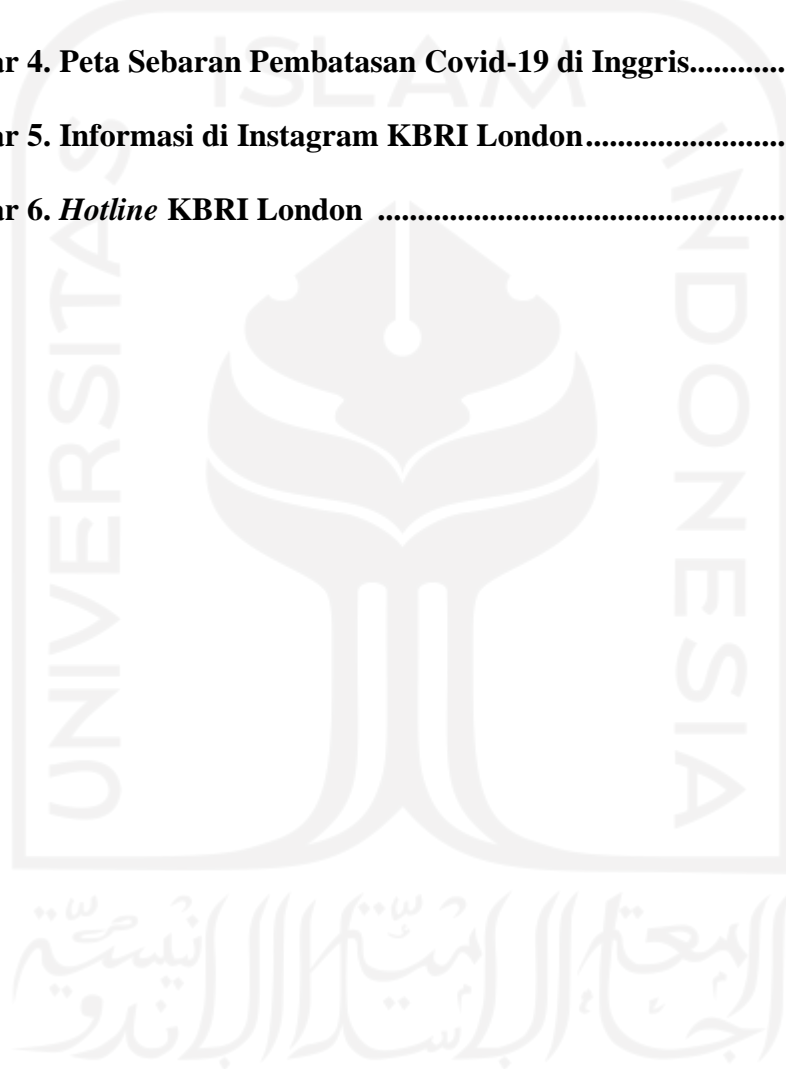
## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	15

1.9	Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II PROBLEMATIKA PELAJAR INDONESIA SELAMA COVID-19 DI</b>		
<b>INGGRIS.....</b>		
2.1	Problematika Covid-19 di Inggris.....	18
2.2	Dampak Covid-19 di Inggris bagi Pelajar Indonesia.....	24
<b>BAB III PERAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI</b>		
<b>LONDON MERESPON PANDEMI COVID-19 BAGI PELAJAR</b>		
<b>INDONESIA DI INGGRIS.....</b>		
3.1	Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dalam Merespon Pandemi Covid-19 bagi Pelajar Indonesia di Inggris.....	29
3.1.1	Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Merespon Pandemi Covid-19 bagi Pelajar Indonesia di Inggris yang memutuskan Pulang ke Indonesia.....	31
3.1.2	Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Merespon Pandemi Covid-19 bagi Pelajar Indonesia yang Menetap di London.....	38
3.2	Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dalam Sudut Pandang Konvensi Wina 1961.....	47
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		
2.1.	Kesimpulan.....	50
2.2	Rekomendasi.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
		<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Proses Penelitian Dengan <i>Analytic Induction</i>.....</b>	<b>16</b>
<b>Gambar 2. Kasus Covid-19 Berdasarkan Usia .....</b>	<b>21</b>
<b>Gambar 3. Kasus Covid-19 di Inggris dari tanggal 7 Januari 2020 - 6 Januari 2021.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 4. Peta Sebaran Pembatasan Covid-19 di Inggris.....</b>	<b>23</b>
<b>Gambar 5. Informasi di Instagram KBRI London.....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 6. <i>Hotline</i> KBRI London .....</b>	<b>42</b>



## DAFTAR SINGKATAN

KEMLU	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
PPI	: Persatuan Pelajar Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
WHO	: World Health Organization
KEMDIKBUD	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SATGAS COVID-19	: Satuan Tugas Penanganan COVID-19
COVID-19	: Corona Virus Disease-2019
PCR	: Polymerase Chain Reaction
NHS	: National Health Service
WNI	: Warga Negara Indonesia
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
ABK	: Anak Buah Kapal
PNS	: Pegawai Negeri Sipil



## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, dalam merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia di Inggris. Cakupan dari penelitian ini dimulai pada 6 Januari 2020 – 21 Juni 2021. Dalam hal ini, KBRI London memiliki tugas dan fungsi dalam melindungi pelajar Indonesia dari bencana non alam, yaitu pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data berbasis dokumen yang didukung juga dengan metode berbasis internet. Analisis kasus akan menjelaskan mengenai peran yang dilakukan KBRI London dalam merespon kasus pandemi Covid-19 dengan mengacu pada Konvensi Wina 1961. Penulis menemukan bahwasanya peran KBRI London dilakukan dengan dua jenis pokok utama, yaitu merespon pandemi covid-19 bagi pelajar Indonesia yang menetap di Inggris maupun yang memutuskan pulang ke Indonesia

**Kata Kunci:** Covid-19, Indonesia, Inggris, KBRI, Perlindungan, Pelajar Indonesia

## Abstract

*This article attempts to analyze the role of the Embassy of the Republic of Indonesia (KBRI) in London, in responding to the Covid-19 pandemic for Indonesian students in the UK. The scope of this research begins on January 6, 2020 – June 21, 2021. In this case, the Indonesian Embassy in London has the duty and function to protect Indonesian students from non-natural disasters, namely the Covid-19 pandemic. The research method used in this study uses qualitative methods, with document-based data collection also supported by internet-based methods. The case analysis will explain the role of the Indonesian Embassy in London in responding to the Covid-19 pandemic case by referring to the 1961 Vienna Convention. The author finds that the part of the Indonesian Embassy in London is carried out in two main types, namely responding to the COVID-19 pandemic for Indonesian students living in the UK. and those who decide to return to Indonesia*

**Keywords:** Covid-19, Indonesia, UK, Protecting, Indonesian Students

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pelajar semakin sadar akan pentingnya memperdalam keilmuan. Tidak jarang untuk dapat memperdalam keilmuannya, pelajar rela meninggalkan negara asalnya agar bisa belajar dan merasakan pengalaman yang berbeda di negara tujuan. Beragam motif tercipta yang mengarahkan pelajar memiliki motivasi untuk memperdalam keilmuannya di luar negeri, seperti keinginan untuk meningkatkan penguasaan keterampilan bahasa asing, hingga pada kemauan dalam meningkatkan kapasitas dirinya dalam mempersiapkan masa depan (Andrian, et al. 2020, 63)

Peningkatan minat pelajar Indonesia dalam menempuh pendidikannya ke luar negeri, dapat terlihat dari hasil *Quick Count Achievement SUN Education* pada tahun 2018, dari hasil tersebut terlihat bahwasanya pelajar Indonesia tersebar pada negara tujuan, seperti Australia yang mencapai 31 persen, Inggris 18 persen, Singapura 18 persen dan 13 persen berada di Malaysia. Selain itu, peningkatan jumlah pelajar juga terjadi pada negara-negara Eropa, Kanada, dan Asia lainnya, yang total dari persebarannya mencapai sekitar 10 persen (Hidayat 2019).

Dari banyaknya negara tujuan yang dipilih oleh pelajar, Inggris masih menjadi primadona bagi pelajar sebagai negara tujuan dalam menempuh Pendidikan. Tingginya minat pelajar menuju Inggris bukanlah tanpa sebab, hal ini dapat didasari dengan masuknya 4 (empat) Universitas di Inggris sebagai 10 universitas terbaik di dunia. Universitas tersebut antara lain, University of Oxford,

University of Cambridge, Imperial College London, dan University College London menurut versi QS World University Ranking tahun 2020 (QS World University Rankings 2020).

Menurut Direktur British Council Paul Smith, jumlah pelajar Indonesia di Inggris pada tahun 2019 mencapai 4.500 orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Bahkan di tahun 2017 yang lalu, jumlah pelajar Indonesia di Inggris mampu melebihi pelajar yang berasal dari Malaysia ataupun Singapura (Ariesta 2019). Peningkatan kuantitas pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Inggris inipun tentunya perlu diperhatikan, supaya para pelajar dapat terlindung dan tetap merasa aman meskipun sedang menempuh pendidikan di luar negeri.

Melindungi para pelajar dari berbagai ancaman merupakan suatu tanggung jawab bagi negara. Hal ini didasari dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 yang termuat pada Alinea IV, menyebutkan bahwasanya salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (Manurung and Nabitatus 2020, 3). Perlindungan yang dilakukan oleh negara tidak hanya menyasar pada warga negara yang berada di wilayah negaranya saja, melainkan juga melindungi pelajar yang sedang menempuh Pendidikan di luar batas wilayah Indonesia.

Perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap pelajar juga memiliki beragam jenis dan tantangannya. Seperti halnya yang terjadi pada akhir tahun 2019, yang mana dunia dikejutkan dengan penemuan jenis virus baru yang berdampak pada ancaman krisis kesehatan. Dalam laporan World Health Organization (WHO), awal ditemukan virus baru ini terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok

pada Desember 2019. Virus ini merupakan jenis virus baru yang diakibatkan oleh jenis golongan Virus Corona (SARS-CoV2) yang dinamai dengan *Coronavirus Disease (Covid-19)* (WHO 2020).

Covid-19 merupakan jenis virus yang mudah menular, terutama pada individu yang sedang mengalami permasalahan medis mendasar seperti diabetes, kanker, pernapasan kronis, maupun individu lansia sangat rentan tertular dari Covid-19. Penularan Covid-19 sendiri terjadi melalui tetesan air liur, ataupun cairan yang keluar dari hidung pada saat individu yang terinfeksi batuk maupun bersin (Hasibuan and Ashari 2020, 582). Bagi individu yang terindikasi Covid-19, nantinya akan mengalami gejala seperti flu, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, lesu maupun letih. Bahkan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan pneumonia atau masalah pada paru-paru dan dapat berakhir mengalami kematian (WHO 2020).

Penyebaran dari Covid-19, terjadi tidak hanya di Tiongkok saja, melainkan terus menyebar ke seluruh dunia akibat mudahnya virus ini menginfeksi. Pada 11 Maret 2020, WHO terpaksa menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global (Ibid). Sebagai jenis virus baru, negara-negara di dunia masih belum mengetahui cara yang tepat dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Berbagai upaya dilakukan oleh masing-masing negara, seperti menerapkan *social distancing*, *Lockdown*, pemeriksaan PCR secara massal, hingga melakukan pengembangan vaksin (Martha 2020, 121). Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat memperlambat penyebaran Covid-19 dan melindungi warga negara agar terlindung dari Pandemi Covid-19.

Begitupun dengan Inggris yang mengalami dampak dari penyebaran Covid-19 tersebut. Kasus Covid-19 yang ditemukan di Inggris bermula dari dua orang yang diidentifikasi terpapar Covid-19, salah satu dari dua orang yang terpapar dari Covid-19 merupakan seorang pelajar di University of York. Temuan ini diawali pada tanggal 6 Januari 2020, mahasiswa tersebut mengalami demam yang merupakan gejala dari Covid-19, setelah melakukan perjalanan dari Hubei, Tiongkok menuju Inggris untuk melakukan studi pada semester baru (Lillie, et al. 2020, 600).

Setelah temuan awal tersebut, Covid-19 mulai melanda Inggris dengan penyebarannya yang massif. Persebaran Covid-19 ini lantas mengakibatkan kewalahan pemerintah Inggris dalam menangani virus tersebut. Tercatat dari tanggal 3 April sampai dengan 8 Mei 2020, tingkat *excess mortality* di Inggris mengalami tingkat kematian tertinggi di Eropa selama pandemi Covid-19 sebanyak 7,5%, jumlah ini merupakan yang terbanyak dari lima tahun sebelumnya (Office for National Statistics 2020).

Jika melihat dari perbandingan tingkat *excess mortality* di wilayah Britania Raya, yang merupakan kawasan negara kesatuan dari negara Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Inggris juga mengalami tingkat *excess mortality* mencapai 108%, atau mengalami dua kali lipat dari rata-rata lima tahun terakhir dan menjadi yang tertinggi di kawasan Britania Raya. Diikuti oleh Skotlandia yang menjadi tingkat ke-2 sebesar 72%, Wales sebesar 69%, dan Irlandia Utara sebesar 48% (Ibid).

Sebagai Langkah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Inggris, pemerintah Inggris melakukan kebijakan *Lockdown* dalam penanganannya. kebijakan *Lockdown* pertama di Inggris dilakukan mulai 23 Maret 2020 – 4 Juli 2020. Selama *Lockdown* berlangsung seluruh masyarakat Inggris termasuk pelajar Indonesia, diharuskan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah untuk dapat terhindar dari penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut menyebabkan berbagai aktivitas kegiatan menjadi terbatas, seperti halnya para pelajar di Inggris yang tidak dapat melakukan aktivitas akademiknya secara tatap muka, akibat terjadinya penutupan kampus dari kebijakan *Lockdown* (BBC 2020).

Oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji mengenai peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia di Inggris. Khususnya pada wilayah Inggris yang mengalami tingkat *excess mortality* yang tinggi di wilayah Britania Raya bahkan Eropa. Serta tentunya memberikan dampak terhadap pelajar Indonesia yang berada di Inggris. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, melihat dari belum banyaknya pembahasan yang spesifik mengenai peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dalam merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia di Inggris.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dalam merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia di inggris?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Memahami situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Inggris dan hambatan yang dialami oleh Pelajar Indonesia di Inggris.
2. Mengetahui respon Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam merespon pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Inggris, dari ancaman pandemi Covid-19 dengan menggunakan sudut pandang Konvensi Wina 1961,
3. Mengetahui fungsi dan peran Kedutaan Besar Indonesia sebagai representatif Indonesia di negara penerima, dalam merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia.

### **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini mencakup pembahasan mengenai upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia di Inggris, pada rentang waktu yang dimulai dari kasus pertama ditemukan di tanggal 6 Januari 2020 – 21 Juni 2021, atau sampai dengan kebijakan *Lockdown* diakhiri oleh pemerintah Inggris. Adapun pelajar Indonesia yang dimaksud merupakan individu yang sedang menempuh pendidikannya pada tingkat Sarjana ataupun Diploma dan Magister, yang sedang berada di London, Inggris.

Penelitian ini juga berfokus pada wilayah London, Inggris. Dikarenakan tingkat *excess mortality* di Inggris mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 108%, atau mengalami dua kali lipat dari rata-rata lima tahun terakhir dan menjadi yang tertinggi di kawasan Britania Raya. Diikuti oleh Skotlandia yang

menjadi tingkat ke-2 sebesar 72%, Wales sebesar 69%, dan Irlandia Utara sebesar 48% (Office for National Statistics 2020).

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai penelitian ini berkaitan dengan respon negara dalam melindungi warga negaranya, terkhusus pelajar yang sedang menempuh Pendidikan di luar negeri. Kajian mengenai perlindungan pelajar jika ditelaah kembali, telah ada beberapa yang membahasnya. Akan tetapi, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai bagaimana peran Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam melindungi pelajar Indonesia di Inggris dari pandemi COVID-19. Dari beberapa rujukan yang telah ada, terdapat salah satu rujukan penelitian yang menarik pada penelitian ini yang ditulis oleh (Ardafillah, et al. 2016, 21).

Dalam tulisan tersebut menjelaskan perlindungan warga negara yang berada di luar negeri tidak hanya Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Negara saja, melainkan para pelajar juga perlu dilindungi. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada kasus tersebut, dilakukan dengan cara pemulangan pelajar dari Yaman menuju Indonesia terhadap konflik di Yaman yang sedang terjadi saat itu. Akan tetapi pada penelitian tersebut hanya membahas mengenai perlindungan pelajar pada situasi konflik militer, tidak menjelaskan mengenai situasi dalam ancaman non-militer seperti Pandemi COVID-19.

Pada konteks perlindungan, menurut penelitian yang ditulis oleh (Disantara 2020, 351), menjelaskan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya juga telah dilegitimasi oleh ketentuan hukum nasional maupun internasional. Oleh karenanya peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam situasi apapun, untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat. Begitupun dengan kasus Pandemi



Covid-19 yang membutuhkan adanya perlindungan, agar hak-hak masyarakat dapat terus diperhatikan.

Perlindungan yang dilakukan oleh setiap negara juga berbeda-beda karena perbedaan situasi maupun kondisi yang terjadi, seperti apa yang ditulis oleh (Hardono 2005, 744), menyatakan perlindungan yang dilakukan suatu negara terhadap warga negaranya yang sedang berada di luar negeri, akan memiliki ciri kekhasannya masing-masing antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks ini, secara umum dapat dikatakan serupa, akan tetapi perhatian maupun fokus dari kebijakan mengenai perlindungan warga negara berbeda. Faktor ini terjadi karena dipengaruhi oleh sifat maupun status sebagian besar warga negaranya di luar negeri.

Dengan adanya perbedaan tersebut, suatu negara juga perlu menghormati kedaulatan negara penerima, meskipun tujuannya untuk membantu warga negaranya sendiri. Dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 1 yang mana menyebutkan bahwasanya PBB merupakan organisasi bangsa-bangsa selalu menjunjung tinggi prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara anggotanya. Pasal tersebut juga memperlihatkan terdapat larangan bagi setiap negara anggota untuk tidak melakukan intervensi terhadap negara anggota lainnya, dengan alasan apapun maupun untuk tidak turut serta ikut campur terhadap urusan dalam negeri suatu negara dan kedaulatan negara (Luthfah 2015, 335).

Perlindungan di Indonesia berbeda dengan negara lainnya, seperti yang dikemukakan oleh (Paramitaningrum, Yustikaningrum dan Dewi 2018, 35). Model perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri lebih diprioritaskan pada upaya perlindungan secara hukum. Hal ini berarti ketika Warga

Negara Indonesia (WNI) mengalami suatu permasalahan maupun suatu kasus, pihak dari pemerintah Indonesia melakukan pendampingan dan perlindungan secara hukum sesuai dengan panduan hukum yang menjadi acuan dalam prosesnya selama ini, serta pemerintah Indonesia juga bukan sebagai pihak yang menerima hukuman atas setiap kasus maupun pelanggaran yang telah dilakukan oleh WNI. Oleh karenanya, pada penelitian ini akan menganalisis apakah perlindungan yang dilakukan pada masa pandemi menggunakan yang biasa dilakukan maupun tidak.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dewasa ini kerja sama satu negara dengan negara lainnya sangat diperlukan. Karena bagaimanapun tidak ada suatu negara manapun yang tidak dapat terlepas atau bergantung terhadap negara lain. Ketergantungan yang dimaksud dalam sistem internasional acap kali digambarkan sebagai hubungan jaring laba-laba atau dikenal dengan sebutan *cobweb of relationship*, yang berarti negara secara formal memiliki kedaulatan dan kontrol yang penuh atas masalah domestiknya, akan tetapi masih terikat satu dengan lainnya dalam suatu ketergantungan yang didasari oleh kebutuhan global bersama, serta adanya keinginan untuk dapat mewujudkan tata tertib agar dunia damai dan sejahtera (Sefriani 2016, 3).

Sebagai bentuk upaya dalam melakukan hubungan internasional, baik Presiden ataupun Menteri Luar Negeri memiliki keterbatasan dalam menjalankan kewenangan tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan agen-agen maupun perwakilan diplomatik dan konsuler, yang dikoordinir langsung dibawah kementerian luar negeri untuk membantu kewenangan menjalankan hubungan internasional di negara di mana mereka ditempatkan, perwakilan negara inilah yang dinamakan dengan kedutaan besar. Kedutaan besar memiliki fungsi sebagai saluran diplomatik

dua arah antara negara pengirim maupun negara penerima, serta termasuk juga memberikan layanan konsuler bagi warga negara Indonesia di luar batas negara. Kedutaan besar inilah dalam (United Nations 1961), Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik tahun 1961 memuat tugas, sebagai berikut:

1. *The functions of a diplomatic mission consist inter alia in:*
  - (a) *representing the sending State in the receiving State;*
  - (b) *protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
  - (c) *negotiating with the Government of the receiving State;*
  - (d) *ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;*
  - (e) *promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Dengan demikian kedutaan besar memiliki tugas dan wewenang dalam mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi kepentingan dari negara pengirim dan kepentingan warga negaranya yang berada di negara penerima pada batas-batas yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, merundingkan segala permasalahan yang muncul antara negara pengirim dan negara penerima, melaporkan setiap perkembangan dari kebijakan negara penerima yang memiliki potensi untuk dapat mempengaruhi kepentingan nasional negara pengirim kepada negara penerima ataupun sebaliknya juga dapat memberikan konfirmasi terhadap pertanyaan yang diajukan negara penerima menyangkut kebijakan negara asalnya, serta meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima (Sefriani 2016, 145).

Dalam menjalankan tugasnya, kedutaan besar diberikan hak maupun fasilitas istimewa yang mengacu pada dua amandemen yang mengatur, yaitu Konvensi Wina 1961 dan 1963. Pada landasan tersebut negara penerima diwajibkan untuk mampu menjaga keamanan dan martabat negara pengirim, serta mengharuskan negara penerima untuk memberikan fasilitas keistimewaan dan kekebalan (Sefriani 2016, 162). Kekebalan inilah yang sering kali diberikan secara jelas dalam Undang-undang ataupun peraturan hukum dari negara penerima. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Komite Ahli Liga Bangsa-Bangsa, dasar dari kekebalan dan keistimewaan itu merupakan “*the necessity of permitting free and unhampered exercise of the diplomatic function and of maintaining the dignity of the diplomatic representative and the state which he represents, and the respect properly due to .... traditions.*” (Suryokusumo 2013, 55).

Pemberian hak-hak itu didasarkan pada prinsip resiprositas antarnegara yang diperlukan untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa adanya pertimbangan pada sistem ketatanegaraan dan sistem sosial yang berbeda antar negara yang bersangkutan. Serta prinsip tersebut juga bukan untuk kepentingan perseorangan, melainkan untuk mampu menjamin pelaksanaan tugas bagi kedutaan besar secara efisien, terutama tugas dari negara yang diwakilinya (Ibid). Pada konteks penelitian ini, akan menjabarkan dan menjelaskan fungsi maupun upaya pemerintah Indonesia dengan kedutaan besarnya dalam melindungi pelajar indonesia di inggris dari ancaman pandemi Covid-19, karena pada hakikatnya kedutaan besar juga memiliki tugas dan kewenangan itu untuk melindungi dan hadir sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia di luar negeri.

## 1.7 Argumen Sementara

Pandemi Covid-19 yang menyebar di hampir seluruh negara telah memberikan dampak terhadap aspek kehidupan. Masifnya penyebaran Covid-19 memaksa pemerintah di berbagai negara mengeluarkan kebijakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat hingga menutup perbatasan, guna menghambat laju penyebaran Covid-19. Akibat kebijakan tersebut, tempat-tempat esensial seperti sekolah terpaksa menutup aktivitas pembelajaran di kampus. Pada akhirnya, berdampak pada pengalaman aktivitas pelajar Indonesia selama melaksanakan studi di luar negeri.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam melindungi masyarakatnya, tak terkecuali pelajar Indonesia yang menempuh studi di luar negeri. Para pelajar diberikan izin repatriasi atau pemulangan sebagai bentuk melindungi pelajar pada negara dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi. Akan tetapi repatriasi juga memiliki kekhawatiran bagi pelajar, terutama hambatan proses repatriasi yang perlu diperhatikan juga oleh para pelajar Indonesia. Namun, jika pelajar memutuskan menetap di negara tempatnya studi, pemerintah Indonesia juga perlu menjamin perlindungan yang aman dari situasi yang tidak menentu akibat Covid-19.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan adanya analisis serta data-data yang bertujuan untuk dapat mempermudah dalam menganalisa bagaimana perlindungan bagi pelajar Indonesia di Inggris selama Pandemi Covid-19. Maka dari itu penulis menggunakan metode kualitatif, yakni metode yang menghasilkan sebuah temuan dan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik maupun cara-cara lain dari metode kuantitatif. Dengan kata lain metode kualitatif adalah penelitian yang sifatnya intuitif serta sistematis dan bertujuan untuk dapat membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan secara koheren (Bakry 2016, 62).

Metode kualitatif juga memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan pemahaman analisa dari sebuah studi kasus. Sehingga metode kualitatif dilakukan melalui tahap studi yang mendalam atas suatu fenomena sosial dari suatu daerah, kelompok, maupun individu tertentu. Metode kualitatif menggambarkan mengenai berbagai alat dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data yang dimiliki, baik berupa bahasa lisan ataupun tertulis yang tidak diformalkan menjadi bentuk angka dan kemudian dianalisis sesuai studi kasus yang akan dibahas (Ibid).

Adapun fokus dari penelitian kualitatif menurut (Basri 2014, 836) adalah pada proses dan pemaknaan hasil. Serta perhatian dari penelitian kualitatif lebih tertuju pada manusia, objek, dan institusi, serta hubungan maupun interaksi antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya untuk memahami suatu peristiwa, perilaku, maupun fenomena.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini subjek dan objek penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada peran Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai representatif pemerintah di negara penerima dalam merespon pandemi Covid-19 yang terjadi di Inggris. Serta terdapat pula pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikannya di Inggris, dengan teknik mengambil salah satu sampel sebagai pengambilan data dengan metode kualitatif.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berbasis dokumen (*document-based research*). Dokumen merupakan setiap bahan yang menyediakan informasi-informasi mengenai suatu fenomena sosial tertentu yang keberadaannya secara independen dari tindakan peneliti. Pada prosesnya, peneliti akan mendapatkan dari berbagai jenis sumber dokumen, diantaranya: dokumen primer dan dokumen sekunder (Bakry 2016, 171).

Dokumen primer didefinisikan sebagai dokumen asli yang ditulis oleh suatu individu yang memiliki akses secara langsung dengan informasi yang diteliti. Salah satu jenis dokumen primer yang acap kali digunakan adalah dokumen resmi, atau dokumen yang dirilis ke publik oleh negara, organisasi, maupun kelompok bisnis. Jenis dokumen ini juga hadir dalam berbagai bentuk, seperti laporan penelitian, transkrip wawancara, pernyataan kebijakan, ataupun email resmi (Ibid).

Sedangkan dokumen sekunder adalah dokumen yang dihasilkan dari proses analisis dokumen primer, dengan kata lain menurut Kenneth D. Bailey dalam buku yang ditulis oleh (Bakry 2016, 172). menjelaskan dokumen yang diperoleh dari

individu yang tidak hadir pada tempat kejadian, akan tetapi mendapatkan informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer.

Selain itu didukung juga dengan metode berbasis internet untuk mempermudah dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian, serta dapat untuk mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai topik atas peristiwa tertentu dalam mendukung penelitian. Seperti halnya memanfaatkan berbagai jejaring situs media berita yang tersedia di internet, maupun situs web pemerintah (Bakry 2016, 176).

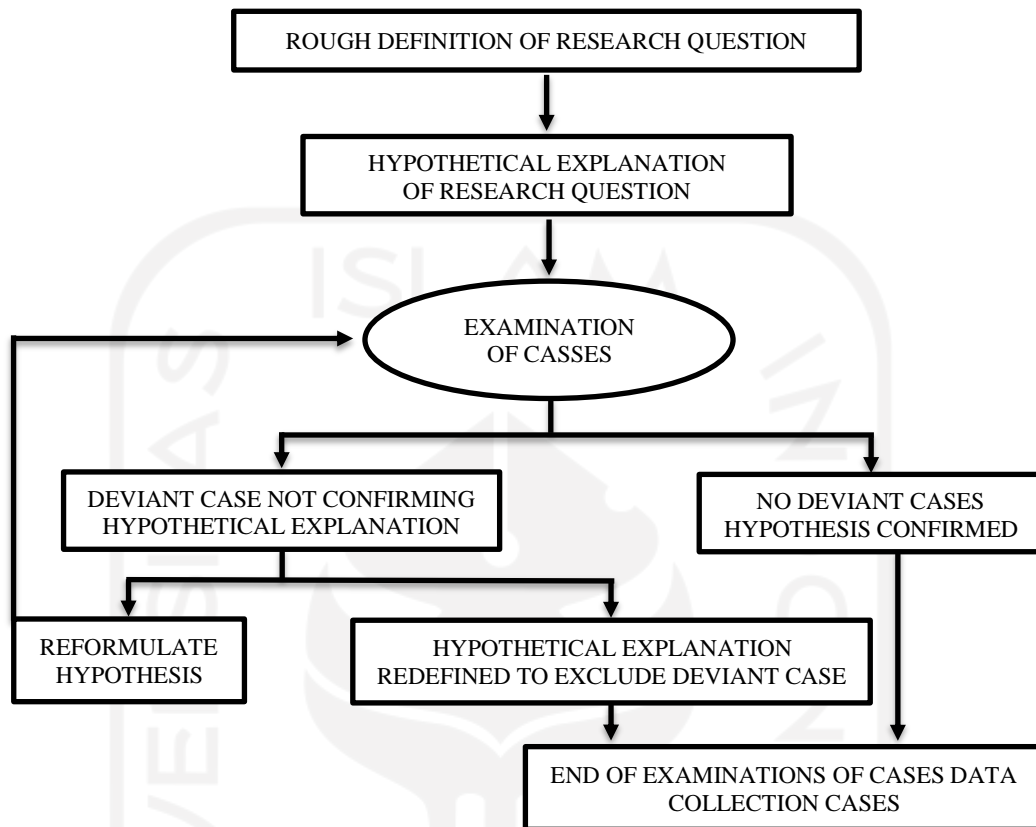
#### **1.8.4 Proses Penelitian**

Proses penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan *analytic induction*. Alan Bryman menjelaskan bahwasanya *analytic induction* merupakan sebuah pendekatan untuk menganalisis data kualitatif, yang mana peneliti mencari penjelasan secara universal mengenai suatu fenomena (sosial) yang diteliti, dengan mengikuti pengumpulan data sampai ditemukannya kasus yang tidak sesuai dengan penjelasan hipotesis dari fenomena yang ditemukan. Dengan kata lain, dalam proses *analytic induction* apabila ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan hipotesis, diperlukan upaya mengumpulkan data lebih lanjut dengan cara meredefinisi ataupun reformulasi hipotesis (Bakry 2016, 192).

Langkah-langkah dalam proses *analytic induction* dimulai dengan definisi kasar dari suatu pertanyaan penelitian, kemudian berlanjut pada penjelasan hipotesis pada studi kasus penelitian, dilanjutkan pada pengumpulan data (eksaminasi kasus). Apabila pada studi kasus yang ditemukan tidak sesuai dengan hipotesis, penulis sebaiknya perlu untuk mengubah (redefinisi) ataupun merumuskan ulang (reformulasi) hipotesis untuk menyingkirkan studi kasus yang



menyimpang tersebut, dan diteruskan dengan pengumpulan data yang lebih lanjut (Bakry 2016, 193). Lebih jelasnya seperti pada gambar berikut.



**Gambar 1.** Proses Penelitian Dengan *Analytic Induction*

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam menganalisa maupun mengikuti seluruh rangkaian pembahasan terhadap penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan, sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan, penulis menjabarkan mengenai Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Cakupan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Argumen Sementara dan Metode

Penelitian mengenai “peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dalam merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia di Inggris”. Penulisan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian ini.

## BAB II: Problematika Pelajar Indonesia selama Covid-19 di Inggris

Pada Bab ke-2 dijelaskan mengenai problematika yang dihadapi pemerintah Inggris dalam menghentikan penularan dari Covid-19 di Inggris, kebijakan pendidikan selama Covid-19 di Inggris, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh para pelajar Indonesia di Inggris selama masa pandemi Covid-19.

## BAB III: Peran Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pelajar Indonesia di Inggris

Pada Bab ini dijelaskan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pelajar Indonesia di Inggris. Dalam upaya tersebut, dianalisis mengenai respon dan peran pemerintah terutama Kedutaan Besar, yang memiliki fungsi sebagai representatif pemerintah di negara penerima selama Pandemi Covid-19 di Inggris. Serta aplikasi teori pada kasus yang diteliti.

## BAB IV: Penutup

Pada Bab ini akan berisi mengenai Kesimpulan maupun Rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan. Disini juga dijelaskan mengenai hambatan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian, beserta rekomendasi atas hasil penelitian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan pada topik ini.

**BAB II**  
**PROBLEMATIKA PELAJAR INDONESIA SELAMA**  
**COVID-19 DI INGGRIS**

**2.1. Problematika Covid-19 di Inggris**

Covid-19 merupakan kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Apabila individu terpapar Covid-19, gejala utama yang akan dirasakan dapat berupa temperatur tinggi, batuk-batuk yang berulang (yang baru terjadi, atau lebih parah dari biasanya), hingga dapat kehilangan penciuman maupun perasa. Covid-19 mampu menyebar melalui transmisi udara, kontak dekat melalui cipratan liur (droplet). Ketika suatu individu yang telah terpapar Covid-19 bernafas, berbicara, batuk atau bersin, yang hal ini memungkinkan untuk melepaskan partikel yang mengandung virus dari penyebab Covid-19. Partikel tersebut mampu masuk melalui mata, hidung, mulut, maupun terhirup oleh individu lain, serta dapat juga ditularkan dari suatu individu ke individu lainnya melalui sentuhan (GOV.UK 2021).

Secara umum, risiko tertular atau menularkan dari Covid-19 akan lebih tinggi pada tempat yang ramai dan tertutup, alhasil akan ada lebih banyak individu yang memungkinkan dapat menularkan dan dengan udara segar yang terbatas. Pada awalnya Covid-19 ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Akibat penyebarannya yang sangat cepat, pada 11 Maret 2020, WHO terpaksa menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, termasuk Inggris yang juga mengalami kasus Covid-19 (WHO 2020).

Kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di Inggris terkonfirmasi adalah seorang mahasiswa internasional berusia 23 tahun dari Universitas York. Temuan ini terjadi pada tanggal 6 Januari 2020, setelah mahasiswa tersebut melakukan perjalanan dari Hubei, Tiongkok menuju Inggris untuk melakukan studi pada semester baru. Mahasiswa yang terpapar itu pun mengalami demam yang merupakan salah satu gejala dari Covid-19. Kasus kematian pertama akibat Covid-19 pertama di Inggris tercatat terjadi pada 5 Maret 2020. Pada 23 Maret 2020 jumlah dari kasus Covid-19 di Inggris meningkat dengan cepat, Perdana Menteri Boris Johnson pada akhirnya terpaksa mengumumkan instruksi “*stay at home*” kepada seluruh warga Inggris, yang merupakan tindakan *Lockdown* pertama di Inggris, semenjak Covid-19 menyebar di Inggris (Ihm, et al. 2021, 619).

*“From this evening I must give the British people a very simple instruction: you must 'stay at home'.... That is why people will only be allowed to leave their home for the following very purpose:d*

- *Shopping for basic necessities, as infrequently as possible*
- *one form of exercise a day - for example a run, walk, or cycle - alone or with members of your household;*
- *any medical need, to provide care or to help a vulnerable person; and*
- *travelling to and from work, but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home.” (GOV.UK 2020).*

Lebih lanjut, pemerintah Inggris meluncurkan *NHS Test and Trace* pada 28 Mei 2020, sebagai upaya untuk memastikan pada setiap individu agar mengetahui apakah memiliki gejala dari Covid-19 secara cepat. Selain itu, sistem ini mampu membantu untuk dapat melacak dan mengetahui siapa saja yang telah kontak dengan individu yang terpapar dari Covid-19. Apabila telah diketahui telah melakukan kontak langsung terhadap individu yang terpapar Covid-19, sistem akan memberitahu kepada individu tersebut untuk melakukan isolasi secara mandiri (UK Health Security Agency 2021).

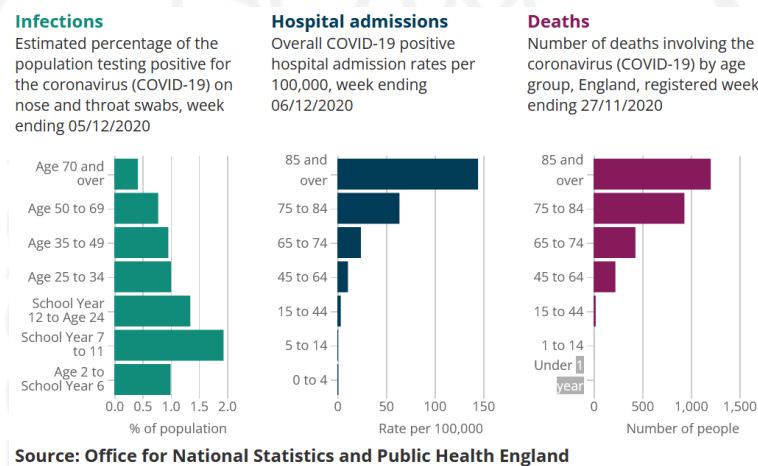
Meskipun telah dilakukan kebijakan *Lockdown* dalam penanganannya. Penyebaran Covid-19 di Inggris masih cenderung mengalami peningkatan. Tercatat dari tanggal 3 April sampai dengan 8 Mei 2020, tingkat *excess mortality* di Inggris mengalami tingkat kematian tertinggi di Eropa selama pandemi Covid-19 sebanyak 7,5%, jumlah ini merupakan yang terbanyak dari lima tahun sebelumnya (Office for National Statistics 2020).

Bahkan apabila melihat dari perbandingan tingkat *excess mortality* di wilayah Britania Raya, merupakan kawasan negara kesatuan dari negara Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Inggris juga mengalami tingkat *excess mortality* mencapai 108%, atau mengalami dua kali lipat dari rata-rata lima tahun terakhir dan menjadi yang tertinggi di kawasan Britania Raya. Diikuti oleh Skotlandia yang berada pada tingkat ke-2 sebesar 72%, Wales sebesar 69%, dan Irlandia Utara sebesar 48% (Office for National Statistics 2020).

Penanganan Covid-19 di Inggris juga memiliki tantangannya tersendiri. Apalagi jika mengingat mudahnya Covid-19 dapat menularkan kepada orang lain, belum lagi permasalahan di lapangan seperti minimnya respon dari pemerintah terutama kepada para tenaga medis di Inggris dalam memfasilitasi APD (Alat Pelindung Diri) bagi para tenaga medis yang bekerja, menjadikan sulitnya tenaga medis untuk melakukan penanganan terhadap pasien Covid-19. Belum lagi masifnya penyebaran Covid-19, menjadikan kapasitas rumah sakit di Inggris melebihi kapasitas. Hal ini dirasakan oleh dr. Ardito Nurdanto Widjono, MBBS, BSc., Dokter di Barnet Hospital dan University Hospital, London mengatakan:

“Yang sulitnya itu perlengkapannya di Inggris, walaupun ini negara maju. Tetap tidak cukup untuk melindungi begitu banyak pasien yang akan datang dalam beberapa minggu kemudian.” (BBC News Indonesia 2020).

Kendatipun jika menilik data, bahwasanya rasio tingkat masuk rumah sakit lebih didominasi oleh individu yang berusia lanjut, usia muda justru menjadi individu yang lebih banyak terpapar dari Covid-19, terutama pada usia rentang usia 20-29 tahun yang didominasi oleh para pelajar. Hal ini disebabkan, para usia muda lebih cenderung melakukan kontak fisik dengan orang lain saat bersosialisasi, daripada kelompok usia yang lebih tua (Office for National Statistics 2020).

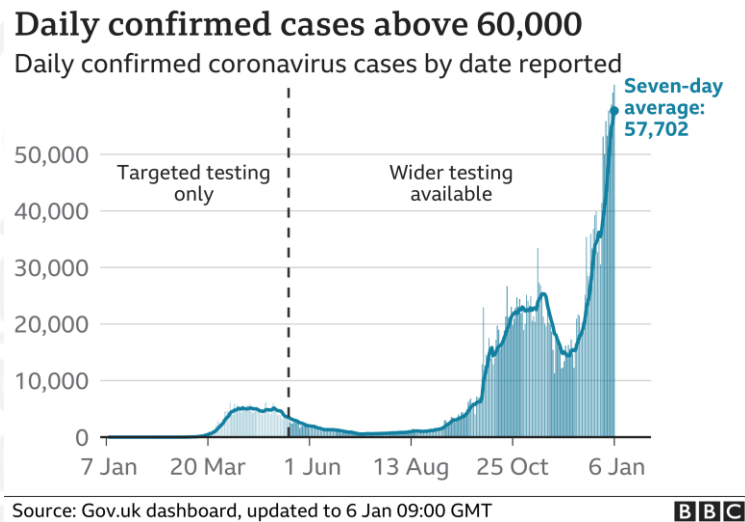


**Gambar 2.** Kasus Covid-19 Berdasarkan Usia

Kecenderungan usia muda lebih banyak terpapar Covid-19, memaksa para individu yang terpapar tersebut untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Belum lagi kebijakan pembatasan akses pada daerah-daerah yang memiliki tingkat rasio lebih tinggi dalam penularan Covid-19 terkait pengendalian Covid-19. Tidak jarang menyebabkan akses makanan yang terbatas atau tidak dapat diandalkan. Akibatnya mampu memicu kekhawatiran yang meluas bagi kesejahteraan para pelajar selama mematuhi peraturan yang ditetapkan (Office for National Statistics 2020).

Permasalahan Covid-19 di Inggris tidak berhenti disitu saja, Inggris kembali mengalami gelombang ke-2 penyebaran Covid-19 pada awal tahun 2021. Terjadinya gelombang ke-2 di Inggris tercatat sebanyak 62.322 kasus baru ditemukan, setelah pengujian tes Covid-19 dilakukan secara massal. Akibatnya,

sejumlah 30.074 pasien yang mengalami kasus Covid-19 terpaksa memenuhi Rumah Sakit di Inggris. Jumlah pasien ini menjadi 39% lebih tinggi dibandingkan puncak dari gelombang pertama pada 12 April 2020. Serta dilaporkan sebanyak 1.041 orang meninggal akibat terpapar virus Covid-19, menjadikan kematian harian tertinggi semenjak bulan April 2020 (BBC 2021).



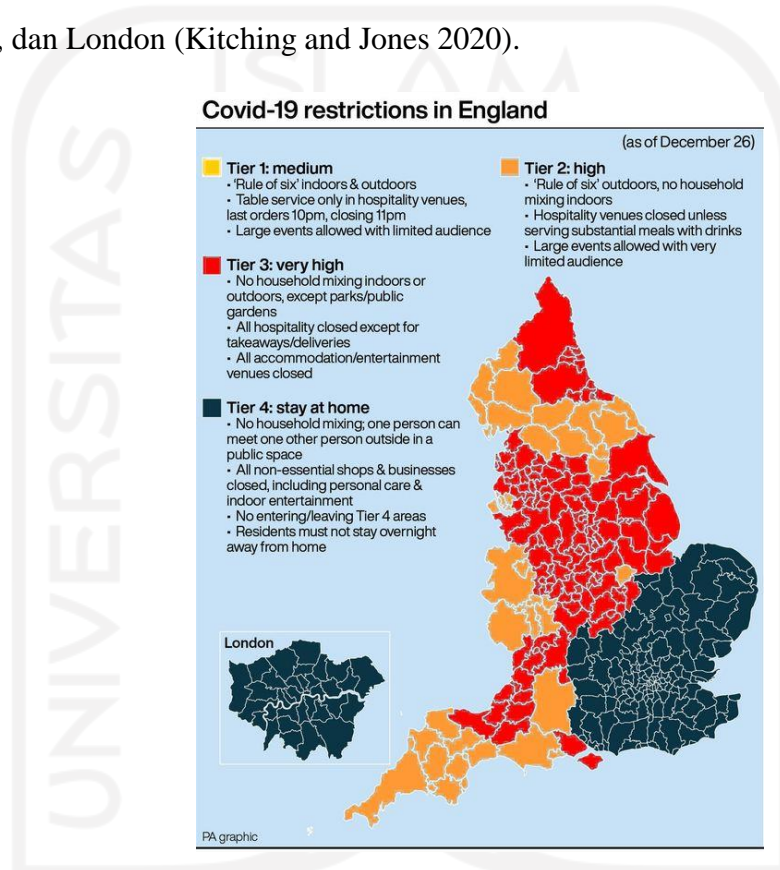
**Gambar 3.** Kasus Covid-19 di Inggris dari tanggal 7 Januari 2020-6 Januari 2021

Pemerintah Inggris kemudian melakukan pembatasan sesuai dengan zona risiko atau disebut dengan “Tier”, yang diterapkan pada level *local authorities*. Sistem Tier ini dibagi menjadi empat karakteristik yang disesuaikan pada tingkat risiko penularan Covid-19. Tier 1 – *medium alert*: dalam zona ini masih diperbolehkan untuk dapat bertemu bersama individu yang bukan dari keluarganya, di dalam ruangan ataupun di luar ruangan dengan maksimal 6 orang. Tier 2 – *high alert*: pada zona ini hanya diperbolehkan bertemu dengan individu yang bukan dari keluarganya di luar ruangan maksimal 6 orang.

Sedangkan untuk Tier 3 – *very high alert*: tidak diperbolehkan bertemu dengan individu yang bukan dari keluarganya di dalam ruangan maupun luar ruangan, kecuali di taman atau di taman umum, dengan ketentuan maksimal 6



orang. Tier 4 – *stay at home*: di zona ini sudah tidak diperbolehkan bertemu dengan individu yang bukan dari keluarganya di dalam ruangan ataupun luar ruangan, serta toko-toko non-esensial ditutup dan masyarakat Inggris disarankan lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Daerah di Inggris yang mengalami kasus Covid-19 dengan sirkulasi virus terbanyak dan diberlakukannya Tier 4, meliputi: Cambridge, Oxford, dan London (Kitching and Jones 2020).



**Gambar 4.** Peta Sebaran Pembatasan Covid-19 di Inggris

Meningkatnya kasus Covid-19 pada gelombang kedua dibandingkan sebelumnya, salah satunya disebabkan adanya kesalahan persepsi dari masyarakat Inggris terkait Covid-19 itu sendiri. Menilik pada awal mula diberlakukannya *Lockdown* pada bulan Maret 2020, masyarakat Inggris sangat tertib menjalankan instruksi dari pemerintah untuk lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Sedangkan pada saat kasus Covid-19 mulai memuncak



kembali dan memasuki gelombang kedua, masyarakat mulai banyak beraktivitas kembali di luar rumah.

Hal ini terjadi karena tumpang tindihnya informasi terhadap penanganan Covid-19, alhasil menyebabkan masyarakat Inggris lebih banyak mengindahkan instruksi pemerintah Inggris terkait mengurangi penyebaran Covid-19, karena terjadinya kesalahan menerjemahkan informasi oleh masyarakat Inggris. Kejadian tersebut diungkapkan oleh dr. Ardito Nurdanto Widjono, MBBS, BSc., pada rangkaian acara webinar:

“Menurut saya, merupakan salah persepsi untuk masyarakat UK, dan menurut saya itu juga karena ada banyak *mix message* dari pemerintah. Ada sempat pesan dari pemerintah bahwa pas hari Natal dan dua hari sebelum dan setelah hari Natal bisa ada *Easing of Lockdown*, jadi bisa datang ke kota mana-mana, bisa ketemu keluarga, dan ini contoh *message* yang tak *clear* sama sekali. Karena saat ini pandemi gelombang ke-2 sudah parah sekali.” (Satgas Penanganan Covid-19 2021).

## **2.2. Dampak Covid-19 di Inggris bagi Pelajar Indonesia**

Situasi yang tidak menentu dan kesadaran masyarakat yang abai terhadap pandemi Covid-19 di Inggris, tentunya dapat menghambat penekanan laju penyebaran Covid-19 di Inggris. Alhasil aktivitas seperti kegiatan di sekolah, tidak memiliki kepastian kapan akan dilaksanakan secara efektif di dalam kampus. Perubahan yang terjadi secara anomali akibat pandemi menimbulkan konsekuensi terhadap pengalaman para pelajar dalam melaksanakan pendidikannya, terutama pada aspek kesejahteraan mental, fisik, maupun finansial yang dimiliki.

Kebijakan *Lockdown* yang dilakukan sebagai upaya menghentikan penyebaran Covid-19, berimbas pula pada penghentian pembelajaran secara tatap muka langsung dan penutupan fasilitas yang dimiliki oleh Universitas di Inggris. Pembelajaran yang semula dilaksanakan secara luring, mulai mengalami perubahan

pelaksanaan pembelajaran secara daring. Aktivitas pendidikan secara daring, lebih menitikberatkan pada streaming melalui internet dengan berbagai platform media pembelajaran online, maupun telah direkam sebelumnya oleh para dosen universitas (Kulkarni and Chima 2021, 8).

Akan tetapi, suatu hal yang menjadi titik kelemahan dari pembelajaran daring adalah sangat bergantung pada mumpuninya akses internet yang dimiliki oleh pelajar. Masih terdapat banyak pelajar yang tidak memiliki akses internet yang mumpuni dan menurut Telecoms Regulator Ofcom terdapat 50.000 rumah tangga di Inggris memiliki akses internet di bawah standar. Apalagi jika melihat bahwasanya tidak semua pelajar Indonesia berasal dari keluarga yang memiliki penghasilan diatas rata-rata. Alhasil perbedaan ini mampu menghasilkan kesenjangan di antara para pelajar dalam mengakses layanan pendidikan (Kulkarni and Chima 2021, 9).

Pembelajaran secara daring juga menimbulkan efek terutama pada pelajar yang membutuhkan aktivitas pembelajaran menggunakan laboratorium, seperti pada mata pelajaran bioteknologi, kedokteran, maupun disiplin ilmu yang serupa. Kebutuhan aktivitas laboratorium tentunya sangat penting bagi disiplin ilmu tersebut, guna melakukan suatu percobaan ataupun membuktikan teori ilmiah yang telah diperoleh pada proses pembelajaran. Namun akibat adanya pemberlakuan *Lockdown*, pelajar terpaksa kesulitan untuk mendapatkan akses layanan laboratorium (Kulkarni and Chima 2021, 8).

Ketidakpastian situasi akibat pandemi Covid-19, menghantarkan para pelajar Internasional di Inggris termasuk pelajar dari Indonesia pada situasi yang tidak ideal. Disamping kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang

mumpuni akibat pemberlakuan pembatasan, serta memungkinkan pelajar terdapat pada situasi yang kurang mampu secara finansial terutama dalam mendukung kebutuhan sehari-hari. Terutama bagi pelajar yang telah menyelesaikan masa studinya, berimbas pada kesulitan untuk pulang ke Indonesia akibat pembatasan yang berlaku, sedangkan untuk tinggal di negara bersangkutan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pandemi juga memberikan pukulan ganda bagi para pelajar, ketika para pelajar tengah berjuang untuk dapat terus melanjutkan pendidikan dan kebutuhan mereka, bersamaan keluarga mereka yang berjuang untuk dapat bertahan hidup secara finansial di negara asal akibat dari konsekuensi pandemi (Kulkarni and Chima 2021, 17).

Permasalahan lainnya yang dialami oleh pelajar Indonesia adalah terkait visa pelajar. Umumnya ijin tinggal yang diberikan kepada pelajar di Inggris adalah selama masa studi ditambah 4 bulan. Akan tetapi dalam beberapa kasus, perpanjangan ijin tinggal dirasa diperlukan, karena beberapa hal seperti studi yang belum dapat terselesaikan dari apa yang telah ditargetkan (Sukmawati 2012). Apalagi pada situasi pandemi Covid-19 yang mampu menyulitkan pelajar dalam menyelesaikan studi, akibat pemberlakuan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Kepulangan kembali ke Indonesia juga bukan perkara yang mudah bagi pelajar Indonesia. Terutama bagi penerima beasiswa yang perlu mematuhi kebijakan dari pemberi beasiswa, yang mengharuskan tetap berada di Inggris selama masa studi berlangsung. Seperti yang diungkapkan oleh Stella Nau merupakan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Inggris (PPI UK), dilansir dari Tempo “Sebenarnya semua kampus sudah meminta kita untuk pulang. Hanya saja,

kebanyakan dari kami kan penerima beasiswa, jadi kami juga bergantung pada kebijakan pemberi beasiswa." (Pramadiba 2020).

Belum lagi terjadinya pembatasan akses keluar/masuk yang diberlakukan oleh berbagai negara, menjadi salah satu penyebab yang menghambat pelajar untuk pulang ke Indonesia akibat berlangsungnya pembatalan penerbangan yang terjadi sewaktu-waktu, dengan tanpa adanya pemberitahuan yang diberikan kepada penumpang maskapai dengan waktu yang cukup (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2020). Akibat pelajar akan mempertimbangkan ulang dalam memilih opsi pulang kembali ke Indonesia, akibat ketidakpastian situasi yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Dari adanya situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, pelajar Indonesia terpaksa masuk pada fase pengambilan keputusan antara untuk menetap atau pulang kembali ke Indonesia. Menurut Lipshitz dan Pras (2005) yang termuat pada Jurnal Inayah Hidayati dengan judul "Covid-19 dan Penundaan Kepulangan Migran pelajar Indonesia di Luar Negeri", mengklasifikasikan proses pengambilan keputusan terbagi menjadi dua fase, yakni pertama fase mendefinisikan situasi yang sedang terjadi dan kedua fase tindakan yang mengimplementasikan, mengevaluasi maupun elaborasi dari hasil fase pertama (Hidayati 2020, 17).

Pada fase pertama, pelajar Indonesia akan berusaha mengumpulkan berbagai informasi maupun data yang relevan, sebagai upaya untuk memudahkan dalam mengambil satu tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia. Dalam proses pengambilan yang akan dilakukan tersebut biasanya akan dipengaruhi oleh individu, keluarga sampai dengan komunitas dari pelajar tersebut. Informasi lainnya didapatkan dari berbagai platform terutama pada jaringan internet, seperti

melalui media massa ataupun sosial media, untuk mengetahui perkembangan dari pandemi Covid-19 itu sendiri (Ibid).

Setelah informasi didapat tentunya pelajar akan melakukan fase tindakan yang akan dilakukan pada situasi pandemi tersebut. Berbagai faktor juga akan dapat mempengaruhi pelajar Indonesia dalam mengambil keputusan. Alhasil pelajar Indonesia perlu menentukan jalan yang terbaik apakah akan memutuskan untuk menetap sementara di negara *host country*, namun mempertimbangkan pula apakah masa izin tinggal tidak akan berakhir selama memutuskan pulang tersebut untuk menghindari dari sanksi imigrasi yang berlaku, serta mempertimbangkan pula pada aspek lain seperti pada faktor ekonomi untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari selama kebijakan *Lockdown* berlangsung. Dilain sisi, apabila pelajar Indonesia memutuskan untuk pulang dengan adanya hambatan berupa penundaan penerbangan dari hasil kebijakan Lockdown di berbagai negara dan kekhawatiran situasi di Indonesia (Ibid).

Keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pelajar Indonesia tentunya bukanlah merupakan perkara yang mudah, perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar utamanya pelajar Indonesia dapat terlindung dari pandemi Covid-19. Terlebih bagi pelajar Indonesia yang hanya tinggal sendirian di luar negeri, tanpa ditemani oleh anggota keluarganya. Oleh karenanya kehadiran negara sangat diperlukan untuk membantu pelajar Indonesia, senantiasa melindungi pelajar Indonesia utamanya dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19.

**BAB III**  
**PERAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LONDON**  
**MERESPON PANDEMI COVID-19 BAGI PELAJAR INDONESIA DI**  
**INGGRIS**

**3.1. Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dalam Merespon Pandemi Covid-19 bagi Pelajar Indonesia di Inggris**

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melindungi pelajar Indonesia yang berada pada luar wilayahnya. Kewenangan tersebut memiliki keterkaitan dengan salah satu misi diplomatik, sesuai dengan wewenang yang terdapat pada Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pada Pasal 5 Konvensi Wina 1963 telah dijelaskan bahwasanya perwakilan tetap diplomatik memiliki suatu wewenang dalam melakukan upaya perlindungan bagi kepentingan dan warga negaranya secara individu dan badan hukum dengan batas yang diatur oleh hukum internasional (Dammen 2005, 721). Perlindungan yang dilakukan terhadap pelajar, salah satunya berupa perlindungan terhadap ancaman bencana non alam seperti pandemi Covid-19.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi pelajar di luar negeri merujuk pada instrumen hukum yang terdapat pada perlindungan migran Warga Negara Indonesia di luar negeri. Oleh karenanya, perlindungan bagi pelajar yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat dikatakan terbilang sama dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap para WNI lainnya. Hanya saja yang berbeda adalah pada situasi dan kondisi yang terjadi, terutama pendekatan kepada pelajar yang perlu disesuaikan oleh pemerintah Indonesia dalam

melakukan perlindungan. Hal ini diperlukan agar pesan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dapat diterjemahkan dengan baik oleh pelajar, ataupun mampu melakukan kerjasama satu sama lain agar mempermudah proses perlindungan bagi pelajar.

Secara garis besar respon yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelajar Indonesia di Inggris, setidaknya terdapat dua pokok utama, yaitu merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia yang menetap di Inggris maupun yang memutuskan pulang ke Indonesia. Kedua pokok utama tersebut tentunya perlu dilakukan semata-mata karena situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19 di Inggris. Serta mempertimbangkan berbagai keuntungan maupun resiko dalam mengambil suatu keputusan. Sebagai upaya mempermudah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelajar di luar batas wilayah Indonesia, tugas tersebut bekerja sama dan dilaksanakan oleh perwakilan tetap, atau dalam penelitian ini dilakukan juga oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London.

KBRI sebagai representatif pemerintah Indonesia di luar negeri, tentulah memiliki wewenang dalam merespon terkait pandemi Covid-19 yang melanda Inggris bagi para WNI, utamanya dalam hal ini pelajar Indonesia. Kewenangan tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi pokok dari KBRI, yang telah dibahas pada kerangka pemikiran di Bab 1. Sebagai upaya dalam menjalankan tugasnya, KBRI akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ataupun bisa juga dengan instansi pemerintahan Indonesia dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan sinergitas, atau dalam hal ini perlindungan bagi pelajar Indonesia di Inggris selama pandemi Covid-19.

### **3.1.1 Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Merespon Pandemi Covid-19 bagi Pelajar Indonesia di Inggris yang Memutuskan Pulang ke Indonesia**

Keadaan situasi yang tidak menentu akibat kebijakan *Lockdown* yang dilakukan pemerintah Inggris, dalam melindungi warga negaranya dari ancaman penyebaran Covid-19. Menghasilkan kekhawatiran bagi para pelajar Indonesia untuk dapat kembali pulang ke Indonesia. Belum lagi, peraturan yang ketat oleh berbagai negara dalam mengatur mobilitas penduduk dengan berbagai skema, menghambat pergerakan maskapai berpindah dari suatu negara ke negara lain (Hidayati 2020, 15). Kondisi ini tentunya mengakibatkan dampak bagi pelajar Indonesia yang berada di Inggris, yang ingin atau telah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Akibat pelajar Indonesia tertunda kepulangannya akibat perkembangan situasi Covid-19 yang tidak menentu

Situasi tersebut seperti yang dirasakan oleh Kristia Ningsih merupakan mahasiswi dari University of Southampton. Dilansir dari Tempo.co, Kristia kesulitan untuk dapat pulang kembali ke Indonesia, diakibatkan oleh mayoritas maskapai penerbangan di Inggris membatalkan jadwal penerbangan ke Indonesia. Keputusannya untuk pulang ke Indonesia, didasari karena sudah tidak ada yang dapat dikerjakannya di Inggris sampai dengan bulan Juni. Selain itu juga, kebijakan *Lockdown* yang diterapkan oleh pemerintah Inggris menjadi alasan agar dapat bisa pulang ke Indonesia (Pramadiba 2020).



Akan tetapi di satu sisi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerbitkan Surat edaran nomor 44128/A.A6/KS/2020 pada tanggal 8 Mei 2020. Dikirimkan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengenai Himbauan bagi Mahasiswa dan Pelajar Indonesia di Luar Negeri. Surat edaran tersebut berisi mengenai himbauan agar pelajar Indonesia yang berada di luar negeri termasuk pelajar Indonesia di Inggris, untuk dapat menunda kepulangannya menuju Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini, didasari untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia yang sedang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) guna menanggulangi penyebaran Covid-19. Hal ini tentunya dapat berimbas pada sulitnya pelajar Indonesia di Inggris untuk dapat kembali ke Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2020).

Meskipun dalam surat edaran tersebut masih terdapat kriteria pelajar Indonesia yang diperbolehkan untuk kembali pulang ke Indonesia, seperti bagi pelajar Indonesia yang telah menyelesaikan masa studinya, dengan persyaratan mampu membuktikan bahwa pelajar tersebut telah lulus melalui surat keterangan lulus dari universitas dan masa tinggalnya yang sudah berakhir. Serta diperbolehkan juga bagi pelajar Indonesia yang masih menempuh pendidikannya, akan tetapi diwajibkan oleh universitas maupun negara tempat domisili pelajar agar kembali ke Indonesia, dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh otoritas negara setempat (Ibid).

Pengecualian bagi sebagian pelajar Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia pada surat edaran tersebut, tentunya dapat memberikan landasan dasar bagi pelajar Indonesia yang akan ke Indonesia. Terutama bagi Pelajar Indonesia yang memiliki kepentingan esensial dan tidak dapat ditinggalkan, sehingga dapat kembali ke Indonesia. Namun bagi pelajar Indonesia yang tidak masuk pada kriteria pada pengecualian persyaratan tersebut, tentunya menjadi kesulitan untuk bisa pulang ke Indonesia, terlebih pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

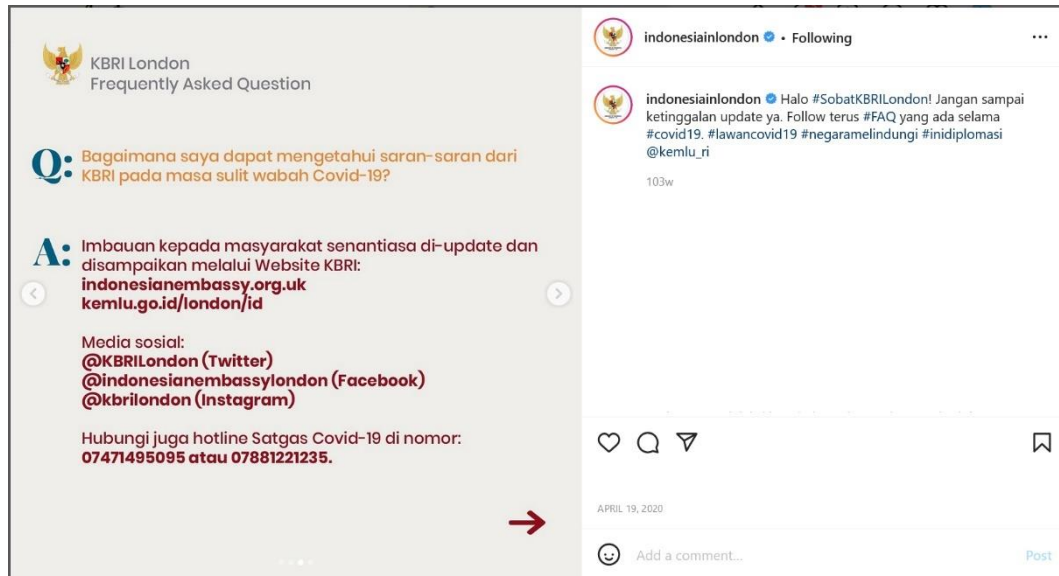
Dinamika kepulangan yang dihadapi pelajar Indonesia juga dirasakan pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021. Hal ini terjadi, karena adanya addendum surat edaran nomor 3 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19, mengenai Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pada surat edaran ini menyebutkan bahwasanya WNI atau dalam hal ini juga termasuk pelajar Indonesia yang berada di Inggris, memiliki berbagai ketentuan khusus yang perlu diperhatikan pada saat melakukan kepulangan menuju Indonesia (Satgas Covid-19 2020).

Peraturan ini terbentuk dikarenakan telah ditemukan varian baru dari Covid-19 di Inggris, yaitu SARS-CoV-2 VUI 202012/01. Akibatnya menjadikan pemerintah Indonesia melalui Satgas Covid-19 memberlakukan ketentuan khusus bagi siapa saja individu yang akan pulang ke Indonesia dari Inggris, termasuk pelajar Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dari *imported case* (Ibid). Kasus *imported case* didefinisikan sebagai kasus virus Covid-19 yang menjangkit suatu individu yang baru kembali dari luar negeri, tanpa terkena dengan kluster manapun.

Dengan demikian individu yang telah kembali dari luar negeri, juga memungkinkan menularkannya pada individu lain pada saat telah sampai di negara tujuan (Putsanra 2020).

Jika menilik kembali asal muasal nya Covid-19 menyebar dan menjadi pandemi, tentunya peraturan tersebut menjadi wajar adanya untuk semata-mata melindungi juga masyarakat yang berada di wilayah Indonesia dari sebaran virus Covid-19. Terlebih melihat kondisi yang terjadi di Inggris yang sebelumnya telah dibahas pada bab 2, dengan adanya varian baru dari virus Covid-19 menyebabkan Inggris mengalami lonjakan kasus Covid-19. Tentunya pemerintah Indonesia tidak mau mengambil risiko yang sama terjadi seperti di Inggris, sehingga peraturan tersebut menjadi langkah preventif pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Sependek pengamatan penulis, kepulangan yang dilakukan oleh pelajar Indonesia bersifat Repatriasi Mandiri, artinya biaya perjalanan sepenuhnya ditanggung oleh pelajar Indonesia yang memutuskan pulang ke Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia memberikan fasilitas berupa sosialisasi dan memberikan informasi terkait hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pelajar Indonesia saat akan pulang ke Indonesia, hingga dokumen yang mungkin diperlukan pelajar Indonesia. Pemberian sosialisasi dan informasi ini dilakukan pemerintah Indonesia melalui KBRI London dengan pemanfaatan media digital yang dimiliki oleh KBRI London, seperti website, sosial media, kanal YouTube, sampai dengan pemanfaatan melalui aplikasi *virtual conference*.



**Gambar 5.** Informasi di Instagram KBRI London

Repatriasi Mandiri ini terjadi, karena pada dasarnya keputusan kepulangan ke Indonesia selama pandemi Covid-19 tidak diwajibkan dan membebaskan kepada para pelajar Indonesia, untuk memutuskan sendiri apakah ingin pulang atau tidak. Tentunya dengan memperhatikan berbagai kebijakan dan informasi, yang terus berubah akibat situasi yang tidak menentu karena pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia masih memberikan fasilitas yang dapat diakses secara gratis oleh pelajar Indonesia yang akan pulang, seperti fasilitas untuk karantina pada saat telah sampai di Indonesia di Wisma Pademangan. Akan tetapi dengan keterbatasan kamar yang dimiliki wisma tersebut, KBRI London menyarankan bagi para pelajar Indonesia untuk melakukan karantina di hotel-hotel berbayar, yang disarankan oleh pemerintah Indonesia (KBRI London TV 2020).

Beban tanggungan biaya lainnya juga ditanggung oleh pelajar Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Seperti halnya dalam melakukan tes dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Tes PCR dilakukan guna mendeteksi keberadaan dari untaian DNA virus Covid-19 di suatu individu, dilakukan dengan cara pengambilan sampel usap dari hidung dan tenggorokan (Ciputra Hospital 2021). Tes PCR ini akan dilampirkan ketika pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia (KBRI London TV 2020).

Selain itu juga KBRI London melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau bagi para pelajar Indonesia yang akan pulang ke Indonesia, terutama bagi pelajar yang telah menyelesaikan masa studinya, untuk memastikan membawa beberapa berkas yang perlu dibawa juga pada saat kepulangan, diantaranya Surat Keterangan Selesai Studi, Surat Pengantar Pindah Sekolah (bagi pelajar Indonesia yang telah memiliki anak), Surat Penilaian DP3 (bagi PNS yang telah menyelesaikan studinya, dan Surat Keterangan Pindah. Hal ini dilakukan agar pelajar Indonesia tidak diminta kembali ke Inggris, hanya untuk mengurus berkas-berkas yang telah disebutkan (Ibid).

Dalam hal ini, penulis belum mendapatkan catatan atau informasi resmi yang melaporkan jumlah pelajar Indonesia yang tidak dapat pulang ke Indonesia dari Inggris. Selain itu, jika dibandingkan dengan Repatriasi Mandiri yang dilakukan oleh KBRI London dengan KBRI Canberra. Terdapat laporan KBRI Canberra memfasilitasi Repatriasi Mandiri bagi para pelajar Indonesia di Australia pada *website* Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dijelaskan bahwasanya KBRI Canberra memfasilitasi Repatriasi Mandiri secara bertahap pada bulan Juni – Agustus 2020, yang disesuaikan dengan jadwal kelulusan para pelajar

Indonesia di Australia, dengan titik keberangkatan dilakukan dari Sydney, Melbourne, dan Perth (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2020).

Program Repatriasi Mandiri yang dilakukan oleh KBRI Canberra ini difokuskan bagi yang telah lulus pada musim dingin di tahun 2020, namun tidak menutup kemungkinan bagi pelajar Indonesia lain yang ingin pulang ke Indonesia. Program yang dilakukan juga hasil dari kerjasama antara KBRI Canberra dengan PPI di Australia, serta kolaborasi dengan Garuda Indonesia yang memfasilitasi penerbangan menuju Indonesia. Dari hasil kolaborasi tersebut pada hari pertama program, telah berhasil memfasilitasi kepulangan sebanyak 163 pelajar Indonesia beserta keluarga, dari total keseluruhan 358 peserta untuk dapat kembali ke Indonesia melalui program Repatriasi Mandiri (Ibid).

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh KBRI London dalam membantu repatriasi bagi para pelajar Indonesia, yang sebatas mengandalkan pada pemberian sosialisasi dan informasi mengenai tata cara kepulangan yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh pelajar Indonesia saat memutuskan untuk pulang. Padahal apabila KBRI London dapat meniru program repatriasi mandiri yang dilakukan oleh KBRI Canberra, melalui kerjasamanya dengan salah satu maskapai Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Tentulah akan membantu bagi pelajar Indonesia di Inggris, agar tidak kesulitan dalam mendapatkan akses penerbangan menuju Indonesia.

### **3.1.2 Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Merespon Pandemi Covid-19 bagi Pelajar Indonesia yang Menetap di Inggris**

Respon yang dilakukan bagi pelajar yang menetap di Inggris, London. Dilakukan pemerintah Indonesia melalui KBRI London dengan memberikan bantuan logistik berupa bahan makan maupun alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, *hand sanitizer* yang merupakan program dari “KBRI Siaga” bagi para diaspora terdampak akibat pandemi. Selain itu KBRI London juga memberikan layanan akses konsultasi bekerjasama dengan tim dari dokter mahasiswa PPI UK bagi para Diaspora yang memiliki gejala dari Covid-19. Bantuan lainnya juga diberikan oleh pihak KBRI London terutama memberikan pengiriman obat bagi para Diaspora yang sakit dan tinggal sendirian, maupun memberikan alat kesehatan kepada para keluarga yang memiliki anggota keluarganya terpapar Covid-19, hingga KBRI London menghubungkan pelajar Indonesia dengan rumah sakit dan National Health Service (NHS) apabila dirasa membutuhkan (Aldila 2020).

Bantuan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu dari bentuk perlindungan yang dilakukan oleh KBRI London bagi para lima kelompok diaspora prioritas, diantaranya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal (ABK) yang tengah bekerja di 13 kapal berlabuh pada perairan Inggris dan Irlandia, PMI di kapal BOT (British Virgin Islands, Cayman Islands, dan Turks and Caicos Islands), WNI tertahan di Inggris, serta WNI yang terdampak Covid-19 termasuk para pelajar Indonesia yang berada di Inggris (Ibid).

Meskipun demikian, KBRI London juga memiliki tantangan dalam memberikan perlindungannya, terutama bagi para pelajar. Tantangan yang dihadapi adalah KBRI London juga perlu mematuhi peraturan yang berlaku di Inggris dalam menangani kasus Covid-19. Terlebih adanya pemberlakuan *Lockdown* yang mengharuskan KBRI London terpaksa melaksanakan aktivitasnya secara *work from home* (melakukan pekerjaan dari rumah). Seperti yang disampaikan oleh Stella Nau pada diskusi *online* dengan tema “Berbagi Kisah dengan WNI di London”, sebagai berikut:

“KBRI sudah tidak beraktivitas lagi, semuanya sudah *work from home* (bekerja dari rumah). Untuk pelayanan konsuler untuk sementara tidak dilakukan. Jadi, biasanya hanya diprioritaskan bagi mereka yang sudah melakukan pelayanan sebelum *Lockdown*. *Passport*-nya akan di *delivery*. Karena sebelumnya jasa *delivery* sudah ada. Tapi untuk pelayanan sehari-hari di KBRI sudah ditutup, dan dari sebelum *Lockdown* pun kbri sudah membatasi untuk datang kesana. Jadi disarankan juga ke teman-teman pelajar maupun masyarakat Indonesia yang tidak urgen kebutuhannya tidak datang ke KBRI.” (Wardhana 2020).

Tidak beraktivitasnya kegiatan kantor di KBRI London tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi KBRI maupun pelajar, dalam mengakses layanan KBRI London. Akan tetapi, KBRI London tetap mengupayakan apa yang bisa dilakukan dalam melindungi pelajar, baik itu pengurusan administrasi yang dapat dilakukan dengan jasa *delivery* yang sudah ada sebelum pandemi Covid-19 melanda Inggris. Adanya layanan tersebut harapannya mampu mempermudah bagi pelajar dalam mengakses layanan KBRI London, terutama bagi pelajar yang akan habis masa izin tinggalnya selama di Inggris.



Sebagai langkah mempermudah pemerintah dalam mempermudah akses layanan daring, dimanfaatkan Portal Peduli WNI yang telah diluncurkan pada tahun 2019. Layanan tersebut ditujukan bagi WNI yang menetap di luar negeri selama 6 bulan atau lebih, seperti halnya pelajar. Portal Peduli WNI memiliki 3 (tiga) hal yang mendasar, yakni terdapat modul lapor diri, pelayanan, dan perlindungan. Adanya layanan Portal Peduli WNI diharapkan mampu memudahkan pelajar dalam mendapatkan layanan KBRI, tanpa perlu hadir secara fisik datang ke KBRI (Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan 2020)

Portal Peduli WNI ada sebagai keperluan untuk mempermudah KBRI London dalam membantu upaya perlindungan maupun mempermudah pelajar mendapatkan hak pelayanan publik pada saat berada di Inggris. Layanan inipun dapat dilakukan dengan cara mengakses [peduliwni.kemlu.go.id](http://peduliwni.kemlu.go.id) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia n.d.). Pemanfaatan Portal Peduli WNI diperlukan selain untuk memudahkan pelajar dalam mendapatkan pelayanan KBRI, tetapi juga mempermudah KBRI untuk mendata pelajar agar mampu mempercepat perlindungan. Perlunya pendataan tersebut apabila merujuk pada (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006) mengenai Administrasi Kependudukan berisi, sebagai berikut:

“Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Dengan adanya layanan Portal Peduli WNI bagi para pelajar, diharapkan mampu memudahkan pelajar dalam mengajukan layanan dengan sistem yang terintegrasi secara daring, ataupun *booking online* bagi pelajar yang akan datang langsung ke kantor KBRI London. Serta diharapkan dapat memudahkan pelajar dalam mengajukan pengaduan secara mandiri dengan memanfaatkan fitur Laporan Diri melalui aplikasi. Portal Peduli WNI juga sebagai upaya pemerintah dalam mendata secara detail, yang mampu berdampak baik dalam memaksimalkan pelayanan dan perlindungan dari KBRI London (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia n.d.).

Meskipun demikian, KBRI London juga membantu apabila dalam keadaan mendesak pelajar Indonesia secara terpaksa melakukan perjalanan lokal di Inggris, terutama pada situasi status Tier 4 (*stay at home*). Pada situasi ini KBRI London akan memberikan Surat Keterangan Jalan yang dapat digunakan pelajar Indonesia diperbolehkan untuk melakukan perjalanan apabila dalam kebutuhan yang esensial. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sayu Oka Widani selaku Koordinator Keprotokol dan Kekonsuleran KBRI London, dalam penjelasan di Webinar:

“Apabila harus melakukan perjalanan karena alasan esensial, seperti misalnya harus ke KBRI karena ada *appointment biometric*. Itu kami akan bekal dengan Surat Keterangan Jalan, jika memang dibutuhkan. Apakah rekan-rekan berasal dari Tier 3 ke Tier 4, pokoknya dari non Tier 4 ke Tier 4, atau antar Tier 4, kami akan coba mengakomodir.” (KBRI London TV 2020).

Selain itu, KBRI London juga memfasilitasi *hotline* apabila terjadi keadaan darurat. Layanan *hotline* tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelajar Indonesia apabila menginginkan informasi mengenai Covid-19 di Inggris, ataupun jika pelajar Indonesia terkonfirmasi Covid-19 namun terkendala dalam mendapatkan layanan

medis. Sehingga dapat menghubungi *hotline* yang telah difasilitasi oleh KBRI London, agar mendapatkan layanan yang cepat dan tanggap dalam menghadapi kasus tersebut. Adapun *hotline* yang disediakan oleh KBRI London, seperti pada gambar berikut:



**Gambar 6.** *Hotline* KBRI London (Sumber: Instagram KBRI London)

Mengetahui adanya tantangan dalam melaksanakan upaya perlindungan bagi pelajar Indonesia di Inggris, KBRI London pada praktiknya melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas WNI yang terdapat di Inggris sesuai dengan area. Salah satu kerjasama yang dilakukan KBRI London adalah dengan PPI (Perkumpulan Pelajar Indonesia). Adanya kerjasama dengan komunitas seperti PPI tentunya memiliki tujuan bersama, yakni sebagai mata dan telinga bagi pelajar yang membutuhkan layanan pemerintah Indonesia. Selain itu juga, hal ini dapat menjadi suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dan komunitas pelajar di Inggris, agar mempermudah dalam pengawasan maupun perlindungan bagi para pelajar (Paramitaningrum, Yustikaningrum dan Dewi 2018, 30). Seperti halnya disampaikan oleh Stella Nau pada diskusi *online*, sebagai berikut:

“Kita punya tim sendiri, namanya tim Covid-19 yang bekerjasama antara Diaspora Indonesia, PPI UK, dan KBRI. Untuk menghimpun sejumlah informasi yang bisa nanti kita sebarkan ke masyarakat Indonesia dan juga pelajar Indonesia yang ada disini. Informasi ini nanti biasanya akan dibentuk dalam *word* atau *pdf* kemudian akan disebar ke *circle-circle* grup WhatsApp yang ada di UK.” (Wardhana 2020).

Kerjasama yang dilakukan tersebut, tentunya akan sangat memudahkan KBRI London dalam menjalankan tugas dan fungsi perlindungannya. Sehingga harapannya dapat menjadikan perlindungan kepada pelajar Indonesia mampu diakses secara luas dan cepat, agar tidak ada satupun pelajar Indonesia luput dari perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui KBRI London. Tidak hanya bekerjasama sampai disitu saja, KBRI London juga melakukan kerjasama terhadap pemerintah Inggris dalam melakukan perlindungan pelajar. Terlebih pemerintah Inggris sebagai negara penerima, memiliki kewajiban dalam melindungi pelajar Indonesia sebagai negara pengirim.

Kewajiban tersebut tertuang dalam (United Nations 1963), Konvensi Wina tahun 1963 mengenai fungsi konsuler pasal 5 pada ayat (a), sebagai berikut: *“protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law;”* dan ayat (e), yaitu: *“helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending state”*. Dengan adanya dasar hukum tersebut yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara, menjadikan negara Inggris sebagai negara penerima memiliki tanggung jawab melindungi pelajar Indonesia yang berada di Inggris. Begitupun sebaliknya, Indonesia juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga negara Inggris di negara

Indonesia sebagai timbal baliknya. Termuat pula pada UU No.1 Tahun 1982, yang disahkan pada tanggal 25 Januari 1982 oleh pemerintah Indonesia (Dammen 2005, 721).

Adanya dasar peraturan tersebut, pemerintah Inggris membuat kebijakan dalam melonggarkan visa bagi para warga negara asing, termasuk pelajar Indonesia. Pelonggaran visa yang diberikan oleh pemerintah Inggris adalah bagi yang telah melewati izin tinggal per tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Kelonggaran tersebut berdampak pada tidak adanya sanksi imigrasi yang dapat merugikan pelajar Indonesia, meskipun pelajar Indonesia tidak mengajukan permohonan untuk mengatur masa tinggal selama periode tersebut (GOV.UK 2020). Sehingga pelajar Indonesia bisa lebih fokus dalam menjalankan aktivitas kegiatannya selama di Inggris pada masa *Lockdown*, tanpa perlu menghiraukan visa yang telah habis masa izin tinggalnya.

Pelonggaran Visa yang diberikan oleh pemerintah Inggris kepada seluruh warga negara asing, termasuk pelajar Indonesia dikenal dengan nama “*Exceptional Assurance*”. Dengan adanya hal tersebut status dari pelajar Indonesia tidak akan *overstay*, sehingga tidak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah Inggris apabila pelajar Indonesia kedatangan memiliki visa yang habis masa berlakunya. Pelajar Indonesia juga diperbolehkan untuk dapat melanjutkan studinya apabila masih belum selesai, atau bahkan memungkinkan untuk bekerja selama periode *Exceptional Assurance* berlangsung (GOV.UK 2020).

Visa sendiri merupakan dokumen izin masuk suatu individu yang didapatkan dari kedutaan dimana negara bersangkutan memiliki Konsulat Jenderal maupun Kedutaan Asing. Visa memiliki peran sangat penting bagi negara penerima dalam menerima orang asing untuk bisa masuk ke negaranya, serta visa akan menjadi tanda bukti bagi suatu individu diperbolehkan untuk berkunjung ke negara tujuan yang diberikan kepada penduduk suatu negara, apabila memasuki wilayah negara lain yang memiliki persyaratan izin masuk. Dengan adanya Visa yang dimiliki, negara penerima memiliki kewajiban dalam melindungi individu dari negara pengirim, serta mendapatkan hak yang sama termasuk hak mendapatkan kesehatan terutama pada masa pandemi Covid-19 (Siregar, Anzward dan Aprina 2019, 457).

Adanya hak yang sama itulah, jika pelajar Indonesia membutuhkan pelayanan kesehatan pada saat di London, atau bahkan terpapar virus Covid-19 dapat ditangani oleh NHS. Dengan KBRI London bertindak menghubungkannya agar mendapatkan penanganan dari NHS. Fasilitas kesehatan dari NHS sendiri dapat dimanfaatkan oleh pelajar Indonesia secara gratis, dan sudah termasuk pembayaran pada saat pelajar Indonesia mengurus Visa untuk dapat belajar di Inggris (Study UK n.d.). Hal ini seperti yang dirasakan oleh Adelia Yulma Budiarto, dalam ceritanya di kanal YouTube:

“Seperti saya yang merupakan disini menggunakan visa pelajar. Jika ada kejadian kesehatan yang terjadi kepada kami, entah itu sakit, kecelakaan, atau apapun. Itu sudah akan dibantu NHS untuk menangani mengobatinya.” (Universitas Airlangga 2020).

Pemerintah Inggris melalui NHS nya juga memberikan layanan vaksinasi gratis bagi seluruh warga negara asing yang berada di Inggris, termasuk pelajar Indonesia. Akan tetapi layanan vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah Inggris bersifat tidak wajib, melainkan akan ditawarkan pada waktu mendapatkan gilirannya. Program vaksinasi tersebut juga tidak memiliki program yang berbayar, yang berarti dapat diakses secara gratis oleh siapapun, dikarenakan pemerintah Inggris memiliki target sebanyak-banyaknya populasi warga negara yang berada di Inggris, pada rentang umur diatas 16 tahun untuk dapat mengakses layanan vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah Inggris (BBC 2020).

Program vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah Inggris ini bertujuan untuk melakukan tindakan prevensi dari virus Covid-19, sehingga penyebarannya dapat bisa dicegah. Cara kerja vaksin mampu mengajarkan kepada sistem kekebalan tubuh yang dimiliki oleh individu, dengan cara membuat antibodi yang mampu melindungi diri dari virus. Sehingga sistem kekebalan tubuh individu dapat mengetahui bagaimana cara dalam melawan virus. Dengan adanya vaksin akan menjadikan sistem kekebalan tubuh lebih aman dalam mempelajari virus yang masuk ke dalam tubuh, dibandingkan apabila suatu individu terpapar virus tanpa mendapatkan vaksin sebelumnya. Harapannya dengan adanya program vaksin yang difasilitasi oleh pemerintah Inggris dapat melindungi warga negara yang berada di Inggris, termasuk pelajar Indonesia dari paparan virus Covid-19 (NHS 2019).



### **3.2 Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia London dalam Sudut Pandang Konvensi Wina 1961**

Tugas dan fungsi yang termuat pada Konvensi Wina 1961 Pasal 3 Ayat mengenai Hubungan Diplomatik, dapat dikatakan telah dilakukan dengan sebaik mungkin oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Hal ini dapat terlihat dari pemaparan yang telah dilakukan mengenai peran KBRI London dalam merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia, baik itu pada saat pelajar tersebut berada di London maupun akan kembali pulang ke Indonesia. Adapun penjelasan peran KBRI London lebih lanjut yang sejalan dengan Konvensi Wina 1961, sebagai berikut:

#### **A. *Representing***

*Representing* atau mewakili negara, yang dalam hal ini KBRI London mewakili memiliki tugas dan wewenang dalam mewakili pemerintah Indonesia di Inggris. Kehadiran KBRI London tentunya sangat vital pada situasi yang pandemi Covid-19, terlebih Presiden ataupun Menteri Luar Negeri memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugas diplomatik di negara penerima. Oleh karenanya dibutuhkan agen-agen maupun perwakilan diplomatik dan konsuler, yang dikoordinir langsung dibawah kementerian luar negeri untuk membantu kewenangan menjalankan hubungan internasional di negara di mana mereka ditempatkan, perwakilan negara inilah yang dinamakan dengan Kedutaan Besar.

Dalam menjalankan tugasnya KBRI London selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ataupun dengan instansi pemerintahan Indonesia lainnya, seperti KEMDIKBUD, SATGAS COVID-19, ataupun instansi pemerintah Indonesia lainnya dalam melakukan tugas dan



fungsinya untuk menghasilkan sinergitas, atau dalam hal ini perlindungan bagi pelajar Indonesia di Inggris selama pandemi Covid-19.

### **B. *Protecting***

*Protecting* (Perlindungan) menjadi pokok utama pada apa yang dilakukan oleh KBRI London pada masa pandemi Covid-19 di Inggris. Perlindungan yang dilakukan melalui dua pokok utama, yaitu melindungi pelajar Indonesia yang memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan melindungi pelajar Indonesia yang memutuskan untuk tetap berada di Inggris selama pandemi Covid-19 berlangsung. Kedua fokus tersebut didasari dengan situasi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda Inggris, serta faktor dari adanya pertimbangan dari para pelajar Indonesia untuk memutuskan kembali pulang ke Indonesia ataupun menetap di Inggris. Perlindungan juga dilakukan sebagai bentuk upaya memastikan hak-hak pelajar Indonesia di Inggris mendapatkan hak yang sama untuk dapat terlindung dari dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19.

### **C. *Negotiating***

*Negotiating* (Negosiasi) dilakukan oleh KBRI London terhadap pemerintah Inggris selaku negara penerima, serta komunitas diaspora Indonesia di Inggris, seperti PPI (Perkumpulan Pelajar Indonesia). Adanya negosiasi atau kerjasama terhadap pemerintah Inggris, dilakukan karena pemerintah Inggris sebagai negara penerima juga memiliki kewajiban dalam melindungi pelajar Indonesia sebagai negara pengirim. Kewajiban tersebut tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1963 mengenai fungsi konsuler pasal 5 pada ayat (a) dan (e).

Sedangkan dengan adanya kerjasama dengan komunitas seperti PPI tentunya memiliki tujuan bersama, yakni sebagai mata dan telinga bagi pelajar yang membutuhkan layanan pemerintah Indonesia. Selain itu juga, hal ini dapat menjadi suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dan komunitas pelajar di Inggris, agar mempermudah dalam pengawasan maupun perlindungan bagi para pelajar.

#### **D. *Ascertaining***

*Ascertaining* (pelaporan) dilakukan KBRI London dalam melaporkan perkembangan situasi yang terjadi di Inggris selama pandemi Covid-19 kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya mempermudah jalannya pengambilan kebijakan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelajar Indonesia di Inggris. Terutama pada aspek melakukan perlindungan, baik itu bagi pelajar Indonesia yang memutuskan tinggal di Inggris, maupun bagi pelajar Indonesia yang memutuskan pulang ke Indonesia pada saat pandemi Covid-19.

#### **E. *Promoting***

*Promoting* (promosi) yang dilakukan oleh KBRI London dilakukan tidak dengan secara langsung. Hal ini dikarenakan akan sejalan dengan apa yang KBRI London perbuat dalam melindungi pelajar Indonesia di Inggris. Dengan KBRI London mampu berhasil melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka Indonesia dapat dicitrakan dengan baik. Apalagi hal tersebut sejalan dengan apa yang termuat pada ideologi dari Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **2.1. Kesimpulan**

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, memaksa pemerintah perlu mengambil peran dalam melindungi warga negaranya dari penularan virus, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tersebut dilakukan, sebagai bentuk negara hadir di tengah-tengah masyarakat selama pandemi Covid-19. Tidak terkecuali pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikannya di Inggris, mengalami problematikanya sendiri selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Berbagai hambatan dirasakan oleh pelajar Indonesia di Inggris selama masa pandemi Covid-19 berlangsung dan menghantarkan para pelajar Indonesia di Inggris pada situasi yang tidak ideal. Hambatan seperti kebijakan Lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Inggris yang menyebabkan berbagai aktivitas kegiatan menjadi terbatas, terbatasnya finansial pelajar Indonesia, hingga pada pembatasan migrasi yang terjadi di berbagai negara telah menghambat pelajar Indonesia untuk dapat kembali ke Indonesia.

Peranan pemerintah menjadi suatu hal yang diperlukan agar dapat membantu problematika yang dihadapi pelajar Indonesia di Inggris. Melalui KBRI London, pemerintah melakukan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang berlaku dalam melindungi pelajar Indonesia di Inggris pada ancaman pandemi Covid-19. Respon yang dilakukan oleh KBRI London terhadap pelajar Indonesia selama pandemi Covid-19, adalah sama dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap para WNI lainnya. Dikarenakan menggunakan instrumen hukum yang

terdapat pada perlindungan migran Warga Negara Indonesia di luar negeri. Namun, yang membedakan adalah situasi dan kondisi yang terjadi, terutama pendekatan kepada pelajar yang perlu disesuaikan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan. Bahkan pelajar Indonesia melalui PPI, diajak bekerjasama dengan KBRI London dalam melakukan upaya perlindungan kepada pelajar lainnya.

Peran yang dilakukan oleh KBRI London juga dilakukan pada dua pokok utama, yaitu merespon pandemi Covid-19 bagi pelajar Indonesia yang menetap di Inggris selama pandemi Covid-19 berlangsung maupun bagi pelajar Indonesia yang memutuskan pulang ke Indonesia. Kedua fokus tersebut didasari dengan situasi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda Inggris, serta faktor dari adanya pertimbangan dari para pelajar Indonesia untuk memutuskan kembali pulang ke Indonesia ataupun menetap di Inggris.

Peran KBRI London terhadap pelajar Indonesia yang memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dilakukan pemberian sosialisasi dan informasi mengenai repatriasi mandiri, berupa hal-hal apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh para pelajar Indonesia selama memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Kegiatan tersebut, dilakukan melalui pemanfaatan media digital yang dimiliki oleh KBRI London. Repatria mandiri berarti seluruh biaya pada proses kepulangan ditanggung oleh pelajar Indonesia itu sendiri.

Sedangkan bagi pelajar Indonesia yang memutuskan untuk tetap tinggal di Inggris selama pandemi Covid-19, KBRI London memberikan bantuan logistik hingga memberikan bantuan layanan untuk memfasilitasi bagi para pelajar Indonesia yang kedapatan membutuhkan akses fasilitas kesehatan di NHS. Selain itu juga KBRI London selalu bekerja sama dan memperbarui perkembangan

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, yang hal ini juga disosialisasikan ke para pelajar Indonesia yang berada di Inggris, melalui berbagai media digital yang dimiliki oleh KBRI London.

## **2.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwasanya masih terdapat kekurangan maupun keterbatasan yang dapat ditingkatkan bagi penelitian selanjutnya. Sumber data tentulah menjadi kendala yang dihadapi oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, apalagi jika mengingat bahwasanya topik pembahasan mengenai pandemi Covid-19 yang terbilang baru terjadi pada akhir tahun 2019, menyebabkan ketersediaan sumber data masih sedikit. Belum lagi berbagai kebijakan yang berubah-ubah, dalam menghentikan penyebaran virus Covid-19 dilakukan oleh suatu negara atau dalam hal ini negara Inggris, menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun penelitian ini.

Keterbatasan lain juga dirasakan dengan sulitnya mendapatkan sumber data, dikarenakan pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*), yang ditunjang dengan metode berbasis internet, alhasil menyebabkan keterbatasan dalam mengakses sumber data sangat dirasakan. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan metode pengumpulan data berbasis wawancara. Metode tersebut memungkinkan bagi penelitian selanjutnya untuk mendapatkan data primer dan mampu memverifikasi data langsung dari sumber yang bersangkutan. Sehingga data yang didapat adalah data yang akurat karena bersumber langsung dari sumbernya dan akan memudahkan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, Nindya. 2020. *Bantu WNI Terdampak Covid-19, KBRI London Prioritaskan 5 Golongan*. 05 03. Accessed 02 20, 2022. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200505/19/1236879/bantu-wni-terdampak-covid-19-kbri-london-prioritaskan-5-golongan>.
- Andrian, Restu, Teuku Azhari, Nur Akmaliah, and Ika Kana Trisnawati. 2020. "Motivasi dan Ekspektasi Para Pemburu Beasiswa Kuliah ke Luar Negeri." *Jurnal Dedikasi Pendidikan* 60-69.
- Ardafillah, Mokhammad, Elisabet Regitta, Siti Aan Kumaenah, and Yanottama Patria. 2016. "Perlindungan Hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Mengalami Konflik Bersenjata Internasional." *Jurnal Penelitian Hukum* 15-22.
- Ariesta, Marcheilla. 2019. *Jumlah Pelajar Indonesia Kuliah di Inggris Meningkat*. 04 Maret. Accessed 10 22, 2020. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/MkMBA1VK-jumlah-pelajar-indonesia-kuliah-di-inggris-meningkat>.
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, Hasan. 2014. "Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda." *Journal of US-China Public Administration* 831-838. doi:10.17265/1548-6591/2014.10.003.
- BBC. 2020. *Coronavirus: UK Schools, Colleges and Nurseries to Close From Friday*. 18 03. Accessed 10 23, 2020. <https://www.bbc.com/news/uk-51952314>.
- BBC. 2020. *Covid: First batch of vaccines arrives in the UK*. 03 12. Accessed 04 06, 2022. <https://www.bbc.com/news/uk-55181665>.
- BBC. 2021. *Covid-19: UK records more than 1.000 daily virus deaths*. 06 01. Accessed 05 19, 2021. <https://www.bbc.com/news/uk-55565254>.
- BBC News Indonesia. 2020. *Curhat dokter asal Indonesia di London: "Tanpa perlindungan layak, kami khawatir"*. 24 03. Accessed 10 14, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=-B55waWpQH4>.
- Ciputra Hospital. 2021. "Apa itu Tes PCR?" *Ciputra Hospital*. 01 20. Accessed 04 07, 2022. <https://cipurahospital.com/apa-itu-tes-pcr/>.
- Dammen, Nicholas Tandi. 2005. "Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri." *Jurnal Hukum Internasional* 710-726. doi:<https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.4.3>.
- Disantara, Fradhana Putra. 2020. "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Cendekia Hukum* 48-60. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.349-366>.
- GOV.UK. 2020. *Coronavirus (COVID-19): advice for UK visa applicants and temporary UK residents*. 24 03. Accessed 04 05, 2022.

- <https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents>.
- GOV.UK. 2021. *Coronavirus: how to stay safe and help prevent the spread*. 29 03. Accessed 10 20, 2021. <https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do>.
- GOV.UK. 2020. *Prime Minister's Statement on Coronavirus (Covid-19): 23 March 2020*. 23 03. Accessed 10 20, 2021. <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-23-march-2020>.
- Hardono, Djoko. 2005. "Perlindungan Warga Negara dalam Perbandingan." *Jurnal Hukum Internasional* 727-747. doi:10.17304/ijil.vol2.4.4.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua, and Anisa Ashari. 2020. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 581-594. doi:<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i17.15379>.
- Hidayat, Feriawan. 2019. *Minat Pelajar Indonesia Menurut Ilmu di Luar Negeri Terus Meningkat*. 28 April. Accessed 10 22, 2020. <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/nasional/551247/minat-pelajar-indonesia-menurut-ilmu-di-luar-negeri-terus-meningkat>.
- Hidayati, Inayah. 2020. "Covid-19 dan Penundaan Kepulangan Migran Pelajar Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 15-20. doi:<https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.548>.
- Ihm, Laura, Han Zhang, Alexandra Van Vijfeijken, and Mark G. Waugh. 2021. "Impacts of the Covid-19 pandemic on the health of university students." *The International Journal of Health Planning and Management* 618-627. doi:<https://doi.org/10.1002/hpm.3145>.
- KBRI London TV. 2020. "*Persiapan Keberangkatan & Kepulangan*" bersama KBRI London dan PPI UK. 30 12. Accessed 04 07, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=JVCNYRIYz-A>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. n.d. *Citizen Services: Laporan Diri*. Accessed 12 27, 2021. <https://kemlu.go.id/ottawa/id/read/citizen-service-lapor-diri/342/important-information>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2020. *Himbauan untuk Mahasiswa dan Pelajar Indonesia di Luar Negeri dalam masa Pandemi Covid-19*. 08 05. Diakses 04 12, 2022. <https://kemlu.go.id/panama/id/read/himbauan-untuk-mahasiswa-dan-pelajar-indonesia-di-luar-negeri-dalam-masa-pandemi-covid-19/1083/important-information>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2020. *Imbauan kepada WNI di Inggris dan Irlandia Terkait Perjalanan Internasional*. 22 03. Accessed 02 08, 2022. <https://kemlu.go.id/london/id/news/5809/imbau-kepada-wni-di-inggris-dan-irlandia-terkait-perjalanan-internasional>.



- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2020. *Perwakilan RI Fasilitasi Repatriasi Mandiri 358 Mahasiswa dari Australia*. 17 07. Accessed 04 20, 2022. <https://kemlu.go.id/canberra/id/news/7647/perwakilan-ri-fasilitasi-repatriasi-mandiri-358-mahasiswa-dari-australia>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. n.d. *Prosedur Laporan Diri Online*. Accessed 12 27, 2021. [https://kemlu.go.id/london/id/pages/lapor\\_diri/1142/about-service](https://kemlu.go.id/london/id/pages/lapor_diri/1142/about-service).
- Kitching, Chris, and Ian Jones. 2020. *Coronavirus: 16 areas at risk of Tier 4 as Boris Johnson holds crisis meeting*. 29 12. Accessed 05 20, 2021. <https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/coronavirus-16-areas-risk-tier-23236208>.
- Kulkarni, Siddharth, and Parmjit Chima. 2021. "Challenges Faced by UK University Students Due to the Coronavirus Crisis in the Higher Education." *Preprints* 1-27. doi:10.20944/preprints202102.0192.v1.
- Lillie, Patrick J., Anda Samson, Ang Li, Kate Adams, Richard Capstick, Gavin D. Barlow, Nicholas Easom, et al. 2020. "Novel Coronavirus Disease (Covid-19): The First Two Patients in the UK With Person to Person Transmission." *Journal of Infection* 578-606. doi:10.1016/j.jinf.2020.02.020.
- Luthfah, Diny. 2015. "Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional Studi Kasus Penjadapan Indonesia oleh Australia." *Jurnal Hukum PRJORIS* 329-347. doi:<https://doi.org/10.25105/prio.v4i3.389>.
- Manurung, Salmon Abertnego, and Nabitatus Sa'adah. 2020. "Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1-11. doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.1-11>.
- Martha, Jessica. 2020. "Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19." *Journal Unpar* 121-130. doi:<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3859.121-130>.
- NHS. 2019. *Why vaccination is safe and important*. 30 07. Accessed 04 07, 2022. <https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/why-vaccination-is-safe-and-important/>.
- Office for National Statistics. 2020. *Comparison of all-cause mortality between European countries and regions: January to June 2020*. 30 07. Accessed 10 23, 2020. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcaus mortalitybetweeneuropean countriesandregions/januarytojune2020>.
- Office for National Statistics. 2020. *Coronavirus (COVID-19) weekly insights: latest health indicators in England, 11 December 2020*. 11 12. Accessed 5 16, 2021. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialc>



are/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19weeklyinsights/latesthealthindicatorsinengland11december2020#age-differences.

- Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, dan Galuh Dian Prama Dewi. 2018. "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri." *Jurnal Global & Strategis* 17-37. doi:<https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.17-37> .
- Pramadiba, Istman Musaharun. 2020. *Diimbau Pulang Karena Virus Corona, Ini Respon Anggota PPI UK*. 18 03. Accessed 02 17, 2022. <https://dunia.tempo.co/read/1321179/diimbau-pulang-karena-virus-corona-ini-respon-anggota-ppi-uk/full&view=ok>.
- Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan. 2020. *Webinar "Pandemi Covid-19 dan Perlindungan WNI di Luar Negeri*. 10 06.
- Putsanra, Dipna Videlia. 2020. *Arti Imported Case, Salah Satu Kasus Corona COVID-19 di Indonesia*. 10 03. Diakses 04 12, 2022. <https://tirto.id/arti-imported-case-salah-satu-kasus-corona-covid-19-di-indonesia-eD4F>.
- QS World University Rankings. 2020. *Top 10 Universities 2020*. Accessed 10 22, 2020. <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020>.
- Satgas Covid-19. 2020. "Addendum Surat Edaran Kasatgas Nomor 3 Tahun 2020 - Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021." *Satuan Tugas Penanganan Covid-19*. 23 12. Accessed 04 12, 2022. <https://covid19.go.id/artikel/2020/12/23/addendum-surat-edaran-nomor-3-tahun-2020-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-orang-selama-libur-hari-raya-natal-dan-menyambut-tahun-baru-2021>.
- Satgas Penanganan Covid-19. 2021. *Penanganan Pandemi Covid-19 di Inggris dan Australia*. Jakarta, 15 01.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Nadia Anabela, Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. 2019. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 451-470.
- Study UK. n.d. *Layanan Kesehatan*. Accessed 04 06, 2022. <https://study-uk.britishcouncil.org/id/pindah-inggris/kehidupan-mahasiswa/layanan-kesehatan>.
- Sukmawati, Anita. 2012. *Memperpanjang Visa Pelajar (Tier 4 Student Visa) di UK*. 15 09. Accessed 02 08, 2022. [https://kemlu.go.id/london/en/pages/memperpanjang\\_visa\\_pelajar/4308/etc-menu](https://kemlu.go.id/london/en/pages/memperpanjang_visa_pelajar/4308/etc-menu).

- Suryokusumo, Sumaryo. 2013. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: P.T. Alumni.
- UK Health Security Agency. 2021. "Weekly statistic for NHS Test and Trace (England)." *gov.uk*. 2 Desember. Accessed 1 5, 2022. [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/1038052/test-and-trace\\_week-78.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1038052/test-and-trace_week-78.pdf).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006. n.d. "Administrasi Kependudukan." *dpr.go.id*. Accessed 02 26, 2022. [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2006\\_23.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf).
- United Nations. 1963. "Vienna Convention on Consular Relations." *United Nations*. 24 04. Accessed 02 10, 2022. [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9\\_2\\_1963.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf)
- United Nations. 1961. "Vienna Convention on Diplomatic Relations." *United Nations*. 18 04. Accessed 12 17, 2020. [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9\\_1\\_1961.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf)
- Universitas Airlangga. 2020. *Inilah Kisah Perjuangan Alumni Unair yang Kuliah di London Selama Pandemi*. 01 08. Diakses 04 06, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=7AgiNv22Ntg&t=34s>.
- Wardhana, Aditya. 2020. *Podcast: Kisah WNI di London di tengah Wabah Covid-19*. 28 03. Accessed 03 01, 2022. <https://podcasts.apple.com/id/podcast/podcast-kisah-wni-di-london-di-tengah-wabah-covid-19/id1481385457?i=1000469963165>.
- WHO. 2020. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report - 94*. 23 04. Accessed 10 23, 2020. <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-19.pdf>.